



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2006-2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepada Daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun mendatang sebagai arah dan pedoman pembangunan di Daerah ;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah serta sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2006 sampai dengan 2010 dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2006-2010;
- c. bahwa RPJMD Kabupaten Kutai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas disusun secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan dan tanggap terhadap perubahan dengan berpedoman kepada RPJM Nasional dan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Periode 2006 sampai dengan 2025;
- d bahwa RPJMD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 150 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan huruf (c) di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) 2004-2009 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2006-2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
5. Rencana jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKTD) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja - SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2006-2010 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Kutai Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2005.
- (2) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2006-2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD ;
 - b. SKPD dalam menyusun Renstra –SKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas merupakan acuan dalam penetapan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010 yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.

Pasal 4

Renstra –SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010.

Pasal 5

SKPD dapat melakukan dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD.

Pasal 6

- (1) BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010 yang dituangkan kedalam Renstra-SKPD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 8

RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan landasaan hukum RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 3

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

I. POTENSI PENGEMBANGAN

I.1. Posisi Wilayah :

Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan suatu potensi yang cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi. Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya dikaitkan dengan wilayah yang lebih luas adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur poros regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) - Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I-Ibu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde I) - Kabupaten Pasir-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ;
- b. Kabupaten Kutai Timur berada pada poros segitiga pertumbuhan BONSA SEMAWA (Bontang - Samarinda - Sebulu dan Muara Wahau), TANRE MAWA (Tanjung Redeb - Muara Wahau) dan PANDARONG (Balikpapan – Samarinda - Tenggarong).

Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 152 kilometer, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

I.2. Potensi Fisik Dasar dan Sumberdaya Alam :

Potensi hidrologi cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Sangatta, Sungai Telen, Sungai Marah dan Sungai Wahau. Peranan sungai di daerah ini sangat penting, yaitu sebagai sarana transportasi air antara daerah pantai dengan daerah pedalaman, transportasi ke kota-kota besar lainnya, dan sebagai sumber kebutuhan hidup yang dimanfaatkan sebagai bahan sumber air bersih penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya dan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, mandi dan mencuci serta irigasi.

Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah yang memiliki topografi bervariasi menyimpan potensi batubara 5,35 miliar ton. Besarnya potensi bahan tambang di Kutai Timur membuat struktur ekonomi kabupaten ini bertumpu pada sektor pertambangan yang didominasi migas dan batubara.

Selain mempunyai potensi di sektor pertambangan, wilayah Kutai Timur juga sesuai untuk pengembangan agrobisnis dimana tersedia lahan potensial 1,3 juta ha bagi pengembangan komoditas pertanian, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Potensi pengembangan pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman padi ladang, palawija dan sayur-sayuran. Potensi pengembangan lahan basah untuk pengembangan tanaman padi sawah.

Untuk tanaman hortikultura antara lain nanas, durian, rambutan, jagung, lada dan

sayur-sayuran. Lahan pertanian lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah lahan perkebunan untuk antara lain komoditi karet, kelapa dan kakao.

Potensi sumberdaya hutan di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata. Hasil hutan yang utama berupa kayu dari berbagai jenis seperti meranti, kapur, bengkirai, kruing dan ulin. Hasil hutan yang berupa kayu olahan mempunyai nilai ekspor yang tinggi bagi Kabupaten Kutai Timur, hal ini melengkapi nilai ekspor tinggi yang bersumber dari bahan galian.

Sumberdaya alam lain adalah potensi perikanan darat dan laut. Keberadaan beberapa sungai dan garis pantai sepanjang 152 km di wilayah Kutai Timur mempunyai potensi yang cukup besar di sektor perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat. Laut lepas Pantai Sangkulirang dan Sangatta kaya akan berbagai jenis ikan, seperti: ikan pelagis, gembung, senangi dan cumi-cumi.

Sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kutai Timur juga memberikan potensi pengembangan pariwisata, dimana alamnya kaya akan flora dan fauna yang potensial dijadikan obyek wisata.

I.3. Potensi Sumberdaya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2004 sebanyak 168.529 jiwa dengan kepadatan sebesar rata-rata 4,71 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduknya rata-rata 3,56% setiap tahun dalam 4 tahun terakhir. Masyarakat Kabupaten Kutai Timur mempunyai karakteristik sosial budaya yang cukup menarik untuk pengembangan pariwisata.

Dengan sumberdaya alam yang melimpah dan wilayah yang luas mengundang masuknya pendatang dari luar Kabupaten Kutai Timur. Masuknya pendatang didorong oleh dua faktor yaitu (1) terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha yang didorong oleh industri batubara maupun pengelolaan kayu yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah (2) adanya program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masuknya pendatang etnis lain (di luar Kutai dan Dayak) diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur.

I.4. Potensi Ekonomi dan Industri

A. PDRB :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan Perkembangan PDRB mulai tahun 2000-2004 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000, PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp 5.490.584.000.000 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 9.220.372.000.000 dengan laju pertumbuhan sebesar 13,84%.

Tabel PDRB Kabupaten Kutai Timur
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2000 - 2004 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004
1. PERTANIAN	287474.21	293966.44	514811.64	478621.88	496269.59
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4735701.68	5582319.56	6310319.93	6144912.93	7788148.45
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	20008.6	20561.18	34327.47	37394.79	41872.08
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3942.44	4569.86	5915.01	7337.17	8322.85
5. BANGUNAN	35941.79	150529.46	278286.33	225826.72	220780.31
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	203845.4	235975.71	298778.36	296129.56	349368.18
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	101197.56	125447.94	127889.05	129035.79	133917.15
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	69657.75	78803.64	86875.7	91880.1	96639.47
9. JASA-JASA	35813.97	40047.55	70668.09	83616.78	85053.97
PDRB Dengan Migas dan Batubara	5493583.4	6532221.34	7727871.59	7494755.71	9220372.06

PDRB Tanpa Migas	5247975.61	6292932.97	7482046.64	7246423.37	8959067.49
PDRB Tanpa migas dan batubara	794721.68	990412.18	1470085.96	1413295.97	1507409.45

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Timur 2000-2004,BPS Kutai Timur, 2005, diolah

Sektor pertambangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar selama kurun waktu tahun 2000-2004. Pada tahun 2000, sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 86,20% dan pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 84,47%. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB terbesar kedua di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2000 memberikan kontribusi sebesar 5,23% dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 5,38%.

Tabel Persentase PDRB Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 – 2004

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004
1. PERTANIAN	5.23	4.50	6.67	6.39	5.38
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	86.20	85.46	81.66	81.99	84.47
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0.36	0.31	0.44	0.50	0.45
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09
5. BANGUNAN	0.65	2.30	3.60	3.01	2.39
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	3.71	3.61	3.87	3.95	3.79
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.84	1.92	1.65	1.72	1.45
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.27	1.21	1.12	1.23	1.05
9. JASA-JASA	0.65	0.61	0.91	1.12	0.92
PDRB Dengan Migas dan Batubara	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Timur 2000-2004,BPS Kutai Timur, 2005, diolah

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi :

Laju Pertumbuhan Ekonomi periode tahun 2000 s/d 2004 menunjukan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2000-2001 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 18,91% dan pada tahun 2003-2004 meningkat menjadi 23,02%. Meskipun demikian, pada tahun 2002-2003 mengalami pertumbuhan sebesar –3,02 %. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian dan pertambangan mengalami perkembangan negatif.

B.1. Pendapatan per Kapita :

Di Kabupaten Kutai Timur, dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 146.510 jiwa, pendapatan perkapita atas dasar harga konstan tanpa minyak, gas, dan hasil-hasilnya adalah Rp 35.799.447 dan pada tahun 2004 dengan jumlah penduduk 168.529 jiwa pendapatan perkapita meningkat menjadi Rp 52.655.104. Sedangkan pendapatan per kapita tanpa migas dan pertambangan adalah sebesar Rp 6.442.589.

Tabel PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2000 – 2004

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004
Penduduk	146,572	152,285	158,587	165,149	169,928
PDRB Migas&Batubara	5,493,583	6,532,221	7,727,872	7,494,756	9,220,372
PDRB Tanpa Migas	5,247,976	6,292,933	7,482,047	7,246,423	8,959,067
PDRB tanpa Migas & Batubara	794,722	990,412	1,470,086	1,413,296	1,507,409
PDRB/Kapita Migas&Batubara	37,480,442	42,894,713	48,729,540	45,381,781	54,260,464
PDRB/Kapita Tanpa Migas	35,804,762	41,323,393	47,179,445	43,878,094	52,722,727
PDRB/Kapita tanpa Migas & Batubara	5,422,057	6,503,675	9,269,902	8,557,702	8,870,871

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Timur 2000-2004,BPS Kutai Timur, 2005, diolah

B.2.. Struktur Ekonomi :

Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur berkisar antara 81% - 86%. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur, maka dapat dikatakan bahwa bidang fiskal telah pula memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, baik terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Nasional.

B.3. Potensi dan Permasalahan Ekonomi :

a. Peternakan :

Di sektor peternakan, ternak besar terdiri dari sapi, kambing, dan babi. Sampai dengan akhir 2003, ternak sapi memiliki populasi terbesar di Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebanyak 1.153 ekor atau 76,2% dari seluruh jumlah ternak besar. Jumlah ternak yang dipotong selama tahun 2003 adalah sebanyak 2.259 ekor. Jumlah tersebut belum mencukupi permintaan akan jumlah ternak potong di Kabupaten Kutai Timur, sehingga masih ada ketergantungan ternak potong dari daerah luar sebesar 51%. Hal tersebut menjadikan peluang pasar yang besar untuk kebutuhan lokal.

Sedangkan untuk jenis unggas yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari empat jenis, yaitu ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras, dan itik. Pada akhir tahun 2003, terdapat jumlah ternak unggas sebanyak 416.433 ekor. Produksi daging dan telur yang dihasilkan dari keempat jenis unggas tersebut adalah 386,09 ton. Sementara produksi telur yang dihasilkan adalah 100.621 butir (setara dengan 6.405 kg).

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengembangan sub sektor peternakan antara lain sebagai berikut:

1. Pada umumnya petani masih belum mengetahui ukuran (besar) ternak bibit.
2. Tidak semua penerima ternak mau mengikuti saran yang diberikan oleh petugas, sehingga ada beberapa ternak yang mati karena salah memberikan pakan.
3. Masih banyak petani peternak yang belum memahami tentang siklus reproduksi ternaknya.
4. Petani masih belum memiliki kesadaran untuk menanam hijauan tanaman ternak.
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan usaha peternakan terkendala oleh turunnya dana belum tepat waktu, sehingga pelaksanaan tertunda.
6. Kurangnya obat-obatan untuk ternak yang tersedia mengakibatkan banyak ternak yang mati.

b. Kehutanan :

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 3.030.737,687 ha, yang merupakan 84,78% dari total wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang terdiri dari hutan produksi (1.115.477 ha), hutan lindung (211.053 ha), hutan wisata (198.528 ha), dan hutan konversi (1.038.966 ha). Diversifikasi usaha yang dapat dikembangkan

dari sektor kehutanan ini, antara lain: industri plywood, *moulding*, dan kayu olahan. Penebangan liar dan kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, perlu dikembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan disamping menjaga kelestarian kekayaan hayati.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Timur antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ;
2. Maraknya *illegal logging* dan konflik areal, baik vertikal maupun horisontal ;
3. Lemahnya *law enforcement* khususnya di bidang kehutanan ;
4. Meningkatnya lahan kritis akibat degradasi hutan dan lahan ;
5. Sering terjadi *overlapping*, serta ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terkesan ada inkonsistensi regulasi di bidang kehutanan.

c. Pertanian dan Perkebunan :

Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi pertanian yang sangat besar untuk dikembangkan. Luas lahan yang besar serta banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor tersebut merupakan modal dasar sektor pertanian.

Selama kurun waktu tahun 1999 – 2004 produksi padi yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan lokal, sehingga masih membutuhkan pasokan beras dari luar Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2004 Kabupaten Kutai Timur memproduksi beras sebanyak 26.195 ton, sedangkan kebutuhan beras Kabupaten Kutai Timur adalah sebanyak 22.850.164,1 ton. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Timur masih memerlukan pasokan beras dari luar wilayah sebanyak 22.835.572,25 ton.

Pada sub sektor perkebunan, kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi yang besar terutama untuk kawasan Sangkulirang dan Muara Wahau sebagai sub sektor unggulan.

Peluang investasi di bidang ini antara lain :

1. Lahan kering : berupa tanaman keras (kelapa sawit, kakao, lada, vanili, kelapa, dan karet), serta tanaman hortikultura dan palawija (nenas, durian, rambutan, jagung, lada, dan sayur-sayuran).
2. Lahan basah (7.261 ha) : Luas area yang sesuai untuk padi, kacang-kacangan, dan jagung .

Untuk sub sektor perkebunan, sampai sekarang terdapat 13 perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Kutai Timur, yang tersebar di Kecamatan Muara Wahau, Muara Ancalong dan Sangkulirang.

Secara geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur sesuai untuk pengembangan agrobisnis. Komoditas kelapa sawit, karet, coklat, kopi, kelapa, tanaman hortikultura dan palawija (nenas, durian, rambutan, jagung, lada, dan sayur-sayuran) merupakan komoditas unggulan Kabupaten Kutai Timur. Kelapa sawit merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Kutai Timur, termasuk salah satu komoditas

ekspor *crude palm oil* (CPO) Indonesia ke Belanda, India, Cina, Malaysia, dan Jerman. Sedangkan produk inti minyak sawit (PKO) lebih banyak diekspor ke Belanda, Amerika Serikat, dan Brasil. Pada tahun 2002, Perusahaan perkebunan swasta di Kabupaten Kutai Timur memproduksi kelapa sawit sebanyak 65.793 ton. Hasil tersebut langsung diproses menjadi CPO kemudian diangkut ke Pelabuhan Labanan di Kabupaten Berau. Sedangkan perkebunan rakyat memproduksi kelapa sawit sebanyak 6.480 ton.

Untuk mengembangkan sub sektor perkebunan, perlu adanya pengembangan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berorientasi ekspor yang ditunjang dengan peningkatan kualitas SDM dan teknologi ramah lingkungan. Dengan luas lahan yang dimiliki diharapkan akan membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di bidang perkebunan. Selain itu perlu adanya pengembangan industri yang berbasis hasil perkebunan dan peluang pasar komoditi perkebunan yang kompetitif.

d. Pertambangan :

Sebagai salah satu daerah penghasil minyak, Kabupaten Kutai Timur masih memiliki potensi investasi di bidang :

1. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi ;
2. Refinery ;
3. SPBU.

Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, baik berupa bahan tambang maupun utam. Bahan tambang berupa batubara merupakan salah satu komoditas yang menonjol dimana batubara tersebut dijumpai pada formasi-formasi yang sebagian besar terdapat pada bagian utara ke arah tengah timur Kabupaten.

Sedangkan bahan tambang berupa emas penyebaran depositnya terdapat di wilayah pedalaman pada morfologi pegunungan di sekitar hulu sungai Telen (Muara Wahau), sungai Marah, dan wilayah Muara Ancalong. Diperkirakan deposit emas akan banyak ditemukan di daerah pegunungan bagian tengah ke arah barat sampai selatan (daerah sepanjang DAS Telen dan DAS Kelinjau). Terdapat permasalahan *illegal mining*.

e. Perikanan

Ekosistem pesisir dan laut memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai daerah penyangga bagi kehidupan aneka ragam biota yang mempunyai nilai ekonomis penting bagi kehidupan manusia. Kawasan pesisir Sangatta - Sangkulirang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah, terutama untuk perkembangan perikanan.

Peluang yang dapat dikembangkan di bidang perikanan, antara lain :

1. Penangkapan ikan ;
2. Tambak udang / ikan ;
3. *Hatchery* ;
4. *Cold storage*.

Produksi perikanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2003

mencapai jumlah sebanyak 5.197 ton. Meskipun demikian, jumlah tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2003 kebutuhan akan ikan mencapai jumlah sebanyak 4.070.340,6 ton. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Timur pada tahun tersebut masih membutuhkan pasokan ikan dari luar sebanyak 4.065.143,6 ton.

Untuk mengembangkan sub sektor perikanan, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana perikanan serta penerapan teknologi unggulan yang menunjang kemajuan sub sektor perikanan. Dengan adanya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahaan dan sistem informasi yang efisien dan efektif diharapkan akan mendorong pengembangan produk, baik untuk pemenuhan konsumsi sendiri maupun luar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Meskipun demikian perlu diingat untuk mengembangkan usaha perikanan yang ramah lingkungan.

I.5. Potensi Pengembangan Agroindustri :

Kabupaten Kutai Timur memiliki 1,3 juta ha lahan potensial yang cocok dan siap dikembangkan untuk komoditas pertanian bernilai tinggi sebagai basis agribisnis berikut agroindustri. Selain itu Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah perairan pantai sepanjang 152 km dan 4 mil dari garis pantai ke arah laut yang siap dikelola untuk pengembangan agribisnis perikanan berwawasan lingkungan.

Beberapa komoditas agribisnis seperti kelapa sawit, coklat, karet, lada, nenas, dan udang memiliki prospek pasar internasional yang sangat baik. Agribisnis memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar dalam perekonomian dan menjamin kesinambungan pembangunan jika dikelola secara baik, karena pembangunan ekonomi didasarkan pada SDA yang dapat diperbaharui.

I.6. Potensi Pariwisata dan Budaya Daerah :

Di bidang pariwisata, Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi yang besar. Sebelas lokasi potensi wisata yang berupa wisata pantai, sumber air panas, goa, pulau dan lamin adat. Dari potensi wisata tersebut, yang sangat prospektif untuk dikembangkan adalah jenis obyek wisata alam, wisata budaya. Lokasi wisata tersebut seperti pulau Birah-birahan di teluk Manubar Kecamatan Sangkulirang, Teluk Lombok, wisata tambang dan TNK di Kecamatan Sangatta.

Peluang yang dapat dikembangkan di sektor ini antara lain :

1. Wisata Alam :
Taman Nasional Kutai (flora dan fauna), wisata tambang, teluk Lombok dan teluk Perancis, gua dan air panas, keindahan bawah laut di Pulau Birah-birahan.
2. Wisata Budaya :
Kehidupan suku Dayak Kenyah dan Lamin di Muara Wahau, cagar budaya Gunung Kombeng di Muara Wahau, kehidupan suku Basap di sekitar teluk Sandaran, pesta laut dan kehidupan nelayan di Sangkulirang.
3. Wisata pelayaran sungai, penjelajahan hutan

II. PERMASALAHAN INTERNAL

Beberapa permasalahan internal :

- a. Secara geologi, tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai tinggi, semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai di suatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan pada wilayah tersebut rendah ;
- b. Salah satu fenomena mencolok yang terdapat di Kutai Timur adalah kepadatan penduduk yang masih sangat rendah yakni rata-rata 5 jiwa/km² pada tahun 2004. kecamatan yang terpadat 23 jiwa/km² dan kecamatan yang paling jarang penduduknya kurang dari 2 jiwa/km². dari satu sisi gejala ini dapat dinilai sebagai pertanda besarnya peluang ekonomi, dari sisi lain rendahnya tingkat hunian suatu wilayah dapat pula dilihat sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut ada sesuatu hal atau banyak hal yang menyebabkan wilayah tersebut kurang menarik bahkan dihindari atau menjadi pilihan terakhir ;
- c. Bila ditinjau dari latar belakang geomorfologi dan geologinya, tanah di Kutai Timur sangat rawan erosi, rawan longsor, sementara tebing cenderung rawan gugur. Secara umum tanah miskin hara, sehingga masyarakat tradisional bila membuka ladang baru hanya sekali menanam tanaman semusim selanjutnya tanaman keras atau ditinggalkan begitu saja dibiarkan membelukar atau menghutan kembali dengan kombinasi sifat-sifat seperti itu maka lahan dataran rendah yang merupakan andalan utama sebagai kawasan permukiman dan budidaya pertanian tanaman pangan sangat rawan banjir ;
- d. Dilihat dari sumberdaya alam darat, meskipun dari segi ragam relatif terbatas, tetapi dari segi volume Kutai Timur memiliki kekayaan alam yang besar berupa hamparan hutan tropika humid seluas lebih dari 2.780.000 Ha, namun lebih dari 1.440.000 Ha merupakan kawasan lindung. Di kawasan lindung ini pula terkandung sumberdaya andalan Kutai Timur yang berupa batu bara, minyak bumi, emas dan batu gamping (Semenanjung Mangkaliat). Kombinasi keruangan yang paling rawan ialah batubara dan hutan. Sejarah Kalimantan Timur telah mencatat bahwa eksploitasi hutan di formasi yang mengandung batubara telah menghasilkan bencana kebakaran yang berkepanjangan ;
- e. Permasalahan lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997/1998 telah memusnahkan 17.696.090 ha hutan di kutai Timur (IFFM 1999), yang menyebabkan kerugian ekologis berupa rusaknya habitat satwa langka serta berkurangnya keanekaragaman hayati ;
- f. Karena sifat fisik ruang habitatnya sumberdaya alam perairan laut cenderung tidak sepenuhnya dapat dikuasai/dimanfaatkan oleh penduduk. Ada peluang infiltrasi pemanfaatan oleh kekuatan ekonomi dari luar daerah, yang dari segi teknologi maupun organisasi produksi cenderung lebih unggul. Meskipun demikian paling tidak ada dua zona di mana penduduk daerah mempunyai keunggulan akses, baik dari segi fisik maupun segi hukum, yakni wilayah perairan zona I (<6mil) dan perairan *interface* (payau). Sumber kerawanan utama di kawasan ini adalah apabila terjadi eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran air karena penambangan emas, batubara dan minyak bumi ;
- g. Secara kultural penduduk Kutai Timur masih terpisah oleh sekat-sekat nilai adat yang dalam beberapa hal sangat eksklusif. Dari segi pendidikan, pendatang cenderung memiliki pendidikan lebih tinggi. Orientasi adat asli dalam memanfaatkan sumber alam pada umumnya mengandung kebijakan ekologi yang tinggi. Sementara itu

sebagian besar pendatang berorientasi komersial. Ada semangat datang, lihat, ambil dan hengkang (pergi). Kutai Timur bagi mereka bukan habitat, tetapi tidak lebih dari kesempatan investasi dan ekstraksi. Apakah lestari atau tidak, tidak selalu menjadi acuan dalam bertindak, karena Kutai Timur bukan gantungan hidup ;

- h. Jaringan jalan merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan dalam proses pemaduan potensi-potensi wilayah ke dalam satu sistem interaksi yang produktif. Melalui jaringan yang terangkai secara sistemik sinergi keruangan yang produktif antara sumberdaya, baik yang ada di dalam wilayah maupun yang ada di luar wilayah dapat dikembangkan di Kutai Timur. Dari segi fisik pembangunan jalan berhadapan dengan medan pegunungan yang dari segi geomorfologi sangat rawan serta medan rawa-rawa. Ini berarti beban biaya konstruksi dan beban biaya perawatan yang mahal. Pengembangan jaringan menerobos pegunungan yang sebagian berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan hutan produksi akan merangsang eksploitasi hutan dan tambang yang secara ekologis sulit dikendalikan keamanannya ;
- i. Minimnya infrastruktur di suatu wilayah seperti kondisi jalan, alat transportasi, penerangan dan air bersih seringkali menjadi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Meskipun di wilayah tersebut dihasilkan produk-produk pertanian atau lainnya, namun karena minimnya infrastruktur maka produk tersebut tidak dapat dipasarkan dengan baik. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Kutai Timur ;
- j. Berdasarkan data potensi Kabupaten Kutai Timur dapat diketahui bahwa luas kawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan komoditi non kehutanan meliputi 28% dari total luas daerah atau seluas 957.780 ha. Potensi areal tersebut sangat potensial digunakan untuk pengembangan komoditi pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Selain itu potensi perairan dapat dikembangkan untuk usaha perikanan yang kenyataannya untuk perairan darat mampu memberikan hasil lebih dari 50 ribu ton ikan berbagai jenis sedangkan perairan laut dapat memberikan lebih dari 6000 ton ikan berbagai jenis ;
- k. Di sektor pertanian dan perkebunan, kendala yang dihadapi adalah belum adanya pedoman penyusunan kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan, belum adanya laboratorium ternak dan laboratorium pertanian serta banyaknya usulan kelompok tani yang belum tertampung karena keterbatasan dana. Selain itu, kurangnya sarana mobilitas di lapangan sehingga proses monitoring dan pembinaan di lapangan kurang berjalan dengan baik. Rencana disain tata ruang Kabupaten yang belum maksimal sehingga terjadi klaim antar batas desa, kecamatan atau batas antar kabupaten. Produksi beras dan ikan di kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2004 masih mengalami defisit. Dengan demikian Kabupaten Kutai Timur masih belum dapat memenuhi kebutuhan lokal akan beras dan ikan, masih memerlukan pasokan dari luar Kabupaten Kutai Timur ;
- l. Di bidang hukum, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan reformasi di bidang hukum yang tidak dilakukan secara terkoordinasi dengan baik oleh aparaturnya hukum seringkali menimbulkan dampak di dalam perilaku masyarakat yang cenderung mengarah pada disintegrasi bangsa ;
- m. Di bidang Perlindungan dan pengamanan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sumberdaya manusia yang menangani perlindungan dan pengamanan serta minimnya prasarana dan sarana yang mendukung bidang tersebut, sementara di Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah yang rawan bencana alam terutama kebakaran hutan dan kekeringan ;
- n. Permasalahan yang dihadapi di bidang kependudukan dan sumberdaya manusia Kabupaten Kutai Timur adalah kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah, SDM belum mampu bersaing dalam dunia global yang semakin menuntut kompetensi tinggi,

jumlah penduduk yang tidak merata dan tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil, serta cenderung terpusat di daerah perkotaan ;

- o. Permasalahan di bidang pendidikan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur antara lain perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat, pemerataan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan ;
- p. Sementara di bidang kebudayaan, sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki masyarakat yang heterogen dan multi etnis. Besarnya jumlah migran yang masuk ke wilayah Kabupaten Kutai Timur telah menimbulkan berbagai persoalan budaya dalam interaksi antar etnik pendatang dengan penduduk setempat. Salah satu persoalan yang menonjol yang dialami oleh Suku Dayak adalah peliknya masalah hak ulayat ;
- q. Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang perlu diatasi adalah masih tingginya jumlah pencari kerja yang belum dapat mengisi setiap kesempatan kerja yang ada terutama disebabkan rendahnya kualitastenaga kerja pada umumnya. Di samping itu masalah rendahnya tingkat kesejahteraan para pekerja yang telah bekerja yang membawa akibat rendahnya tingkat produktivitas ;
- r. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kutai Timur dalam pembangunan sektor agribisnis adalah kurangnya investasi swasta yang bergerak di sektor agribisnis. Padahal investasi merupakan prasyarat awal bagi pengembangan kegiatan ekonomi. Oleh karenanya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menarik investasi baik berasal dari swasta maupun masyarakat ;
- s. Berdampingan dengan industri besar, industri kecil tidak berkembang secara optimal. Pada umumnya teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga kualitas produk yang dihasilkannya juga masih sangat rendah. Untuk mengembangkan industri yang berdasarkan pada keunggulan kompetitif, Kabupaten Kutai Timur masih menemui banyak kendala terutama yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya yang tidak efisien dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.sumberdaya mineral dan energi merupakan potensi yang strategis dikembangkan pengelolaannya di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi dan permasalahan sumberdaya mineral dan energi yang memiliki nilai ekonomis perlu dikelola secara baik dan efisien dengan memperhatikan konflik terhadap komponen lingkungan hidup dan kerusakan infrastruktur wilayah ;
- t. Kabupaten Kutai Timur mempunyai luas wilayah 3.429.260 Ha, sebagian berupa kawasan hutan (57,87%) sedang selebihnya berupa kawasan non kehutanan (27,93%) dan kawasan lindung (14,29%). Dengan luas hutan yang sedemikian besar maka produksi hasil hutan merupakan andalan untuk memperoleh pendapatan bagi Kabupaten Kutai Timur. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan sub sektor kehutanan antara lain adanya penurunan produktivitas hasil hutan alam akibat konversi lahan dari lahan hutan sekunder ke areal HTI, perkebunan, transmigrasi, pertambangan dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas hasil hutan, tebang liar serta perambahan hutan cenderung meningkat sementara jumlah personil pengamanan perlindungan hutan (JAGAWANA) terbatas dan belum didukung oleh sarana operasional yang memadai. Permasalahan lainnya adalah belum adanya data yang akurat tentang luas dan letak lahan kritis sehingga kurang membantu dalam penyusunan program. Pelaksanaan proyek reboisasi dan penghijauan di hutan lindung sering terhambat dengan masalah okupasi lahan/perambahan hutan oleh masyarakat yang status kepemilikannya belum jelas ;

- u. Dalam setiap kegiatan pengembangan wilayah, salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bidang infrastruktur. Bila dilihat dari wilayah Kabupaten Kutai Timur yang sangat luas dengan jarak antar kota kecamatan yang cukup jauh menjadikan permasalahan infrastruktur terutama jalan menjadi hal yang sangat mendesak, untuk membuka akses menuju desa-desa terpencil ;
- v. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian khususnya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur meliputi penyediaan sarana produksi, kurangnya intensitas penggunaan alat mesin pertanian dalam penyiapan/pengolahan lahan, terbatasnya ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia dalam menggunakan teknologi, ketersediaan dan penyebaran teknologi spesifik lokasi belum mampu menjangkau seluruh tipe lahan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Selain itu kelembagaan pelayanan pemerintah, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan kelompok tani serta sosial ekonomi di tingkat pedesaan masih belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Mekanisme pemasaran hasil produksi belum lancar terkendala sarana dan infrastruktur wilayah, yang mengakibatkan tingginya fluktuasi harga komoditi ;
- w. Di bidang industri, secara umum kondisi industri di Kabupaten Kutai Timur belum berkembang secara optimal. Dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki sesungguhnya sektor industri di kabupaten ini memiliki peluang untuk berkembang lebih baik terutama industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan serta industri kerajinan. Kurangnya peran pemerintah dalam pengembangan industri di Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari lokasi geografis industri yang terpencar-pencar dan terpencil letaknya, dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Keadaan ini makin mempersulit pemasaran produk industri, sehingga mengakibatkan perkembangan sektor industri di Kabupaten Kutai Timur menjadi terhambat ;
- x. Di bidang agroindustri, kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan yang belum terkoordinasi dengan baik dan kesulitan mengubah pola pikir petani terhadap pembaharuan dan penerimaan inovasi bidang agribisnis dan agorindustri ;
- y. Di bidang sosial, penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan latar belakang budaya dan etnis yang beragam sangat rentan terhadap terjadinya konflik horisontal, baik disebabkan adanya kesenjangan sosial maupun permasalahan yang terkait dengan masalah politik ; dan
- z. Di bidang pariwisata, realitas pembangunan kepariwisataan baik wisata alam maupun wisata buatan di Kabupaten Kutai Timur dianggap masih sebatas skenario/wacana, yang apabila dikembangkan dan dikelola secara profesional sebenarnya dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, dan perlunya upaya promosi pasar baik lokal, nasional maupun internasional.

III. PENGARUH EKSTERNAL

III.1. Kebijakan Desentralisasi :

Arah kebijakan pembangunan Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan sistem ini ditetapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Sistem pembangunan yang bersifat otonomi ini memberikan kebebasan kepada suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri dan lebih memungkinkan adanya partisipasi dan kontrol dari masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Demikian juga kecenderungan kebijakan yang bersifat *top down*, secara bertahap menjadi bersifat *bottom up* dimana sumber perencanaan pembangunan dirancang dari pusat untuk diteruskan di daerah. Kemudian dengan adanya era otonomi daerah, aparat daerah dituntut lebih meningkatkan diri agar mampu berfikir dengan kritis, bertindak efisien dan efektif dalam menyusun rencana untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Perencanaan yang disusun harus bersifat strategis agar sumberdaya yang dimiliki oleh daerah itu dapat dioptimalkan dengan baik.

Melalui undang-undang tersebut di atas, Kabupaten Kutai Timur memiliki wewenang yang luas, baik dalam urusan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Kewenangan yang luas di satu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang, tetapi di sisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan undang-undang tersebut dapat lebih leluasa menggunakan kewenangannya untuk mengurus daerahnya, tetapi di lain pihak pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga dibebani tanggungjawab yang tidak kecil.

III. 2. Potensi Wilayah Hinterland :

Wilayah Kabupaten Kutai Timur apabila dipandang dari **segi ekologis** dapat tergolong wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam bidang agribisnis. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh luasnya wilayah burit (*hinterland*) yang secara administratif Busang wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kertanegara merupakan **potensi besar mendukung pengembangan kegiatan perekonomian** Kabupaten Kutai Timur. Dengan kandungan bahan-bahan fosil, produksi perhutanan dan perkebunan wilayah tersebut merupakan peluang bagi Kabupaten Kutai Timur untuk masuk ke dalam sektor hulu jaringan sistem industri Kalimantan Timur yang berbasis industri pertanian, perhutanan dan perkebunan.

Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur poros regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) - Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I-Ibu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde I) - Kabupaten Paser-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, yang menjadikan wilayah Kabupaten Kutai Timur berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian hinterland. Selain itu, akses keluar wilayah cukup terbuka sehingga membuka peluang pemasaran hasil sumberdaya alam dari Kutai Timur.

III.3. Peluang Pengembangan Industri Pendukung Agroindustri dan Agrobisnis :

Mengingat tingginya resiko yang harus ditanggung oleh penduduk Kabupaten Kutai Timur karena ketergantungan yang besar terhadap sektor yang bertumpu pada sumberdaya alam non lestari maka perlu segera mengembangkan alternatif lain sektor ekonomi yang akan dijadikan sebagai *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor ekonomi terpilih yang akan dijadikan *leading sector* tersebut mulai dikembangkan sedini mungkin. Sehingga pada saat industri batubara kehabisan bahan baku, maka sektor ekonomi yang terpilih tersebut sudah berkembang dengan mantap dan mampu menggantikan posisi industri batubara sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

Beberapa hal dapat dijadikan sebagai kriteria bagi sektor ekonomi mampu berperan sebagai *leading sector*. Kriteria-kriteria tersebut adalah kriteria peluang pasar, kemampuan bersaing, keterkaitan ke belakang dan ke depan, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahanbaku/sumberdaya dalam proses produksi dan daya serap pasar dan mempunyai jaminan keberlangsungan yang lestari. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut sektor ekonomi yang diperkirakan mampu sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur di masa mendatang setelah kemampuan industri gas menurun merupakan industri yang mendukung agrobisnis dan agroindustri. Industri ini diharapkan dapat memberikan pasokan kebutuhan bagi kepentingan pengembangan agrobisnis dan agroindustri di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan bagian timur.

Industri pendukung agrobisnis dan agroindustri mempunyai peluang pasar yang sangat besar. Peluang pasar yang tercermin dari adanya potensi permintaan akan produk hasil kegiatan sektor ekonomi tersebut di pasaran lokal, regional dan internasional. Potensi permintaan lokal dapat dilihat dari kemungkinan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur. Potensi permintaan regional terutama berasal dari daerah-daerah Kalimantan Bagian Timur yang mempunyai rencana untuk mengembangkan agrobisnis dan agroindustri untuk pembangunan daerahnya.

Sedangkan potensi permintaan internasional dapat dikembangkan dari terkenalnya nama Kabupaten Kutai Timur sebagai penghasil batubara terbesar di Indonesia di mata dunia. Kebutuhan dunia terhadap sumberdaya mineral dan migas yang cukup tinggi dan mulai berkurangnya sumber-sumber mineral dan migas di wilayah lain menjadikan Kabupaten Kutai Timur berpeluang besar terhadap pasar internasional.

Dengan adanya permintaan regional dan internasional akan mempengaruhi permintaan perekonomian daerah melalui 2 jalan yang masing-masing berdampak ganda. Di satu sisi permintaan tersebut akan menentukan jumlah dan harga bahan yang akan dihasilkan dan diekspor oleh daerah. Dengan demikian permintaan tersebut akan menentukan secara langsung besarnya penerimaan pendapatan daerah, tinggi rendahnya pendapatan penduduk, besar kecilnya kesempatan kerja yang ada dan permintaan barang dan jasa di daerah itu sendiri. Dengan demikian selanjutnya dapat menentukan tinggi rendahnya kegiatan ekonomi daerah secara keseluruhan baik dalam waktu yang berjalan maupun pada masa yang akan datang. Permintaan pasaran regional dan internasional ini akan menentukan besar kecilnya penerimaan dan devisa yang akan diperoleh. Sehingga pada gilirannya akan menentukan kemampuan daerah untuk mengimpor barang dan jasa yang diperlukan bagi berbagai kegiatan produksi yang ada di daerah. Namun di sisi lain bila dieksploitasi secara terus menerus dan tak terkendali akan mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, kebutuhan dunia akan kayu tropis dan hasil hutan untuk bahan baku untuk obat-obatan/kimia akan mendorong eksploitasi hutan di Kabupaten Kutai Timur

Industri pendukung agrobisnis dan agroindustri mempunyai keterkaitan yang tinggi baik ke belakang maupun ke depan dengan sektor ekonomi yang lain. Tingginya keterkaitan tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mengembangkan dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Meningkatnya berbagai aktivitas sektor-sektor ekonomi tersebut akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga pada

akhirnya akan meningkatkan kemampuan ekonomi Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan.

Dukungan ketersediaan sumberdaya baik sumberdaya manusia dan sumberdaya alam merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi. Meskipun demikian penggunaan sumberdaya tersebut harus memperhatikan keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena sumberdaya yang dapat diperbaharui kalau terjadi kerusakan akan memerlukan pemulihan yang memakan waktu sangat panjang.

IV. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis di Kabupaten Kutai Timur saat ini yang paling mendesak dan perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan wilayah 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana diuraikan dalam RPJP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 yang akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah diuraikan sebagai berikut.

IV.1. Kependudukan dan Sumberdaya Manusia :

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan luas wilayahnya serta kepadatan penduduk sangat rendah yang tersebar secara tidak merata dan hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu saja menjadikan sulitnya percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Hal ini dipersulit lagi dengan kualitas sumberdaya manusianya yang relatif rendah dilihat dari tingkat pendidikannya dan belum mampu bersaing dengan penduduk pendatang dari luar wilayah kabupaten yang sengaja mencari peluang di Kabupaten Kutai Timur. Di satu sisi para pendatang tersebut mampu membawa pengaruh positif terhadap perkembangan wilayah dengan turut serta dalam kegiatan pembangunan, namun di sisi lain akan mempersempit peluang bagi penduduk asli dalam memperebutkan kesempatan kerja. Permasalahan lain masih dijumpainya penduduk usia sekolah terutama di daerah pedesaan yang terpaksa bekerja untuk meringankan beban orang tuanya.

Selain permasalahan kependudukan dan sumberdaya manusia secara umum, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mendukung kegiatan agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Kutai Timur, perlu dipersiapkan sumberdaya manusia khusus di bidang agribisnis dan agroindustri. Tenaga-tenaga handal di bidang agribisnis dan agroindustri perlu diciptakan agar mampu mengelola potensi yang ada dan kegiatan di bidang tersebut dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan, yang pada gilirannya mampu menjadi andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah bagi Kabupaten Kutai Timur.

Pada kenyataannya saat ini di Kabupaten Kutai Timur ketersediaan sumberdaya manusia yang handal di bidang agribisnis dan agroindustri masih sangat minim, karena sebagian besar masyarakat yang bergerak di bidang tersebut merupakan petani tradisional yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal.

IV.2. Sumberdaya Alam Bidang Pertanian :

Pemanfaatan sumberdaya alam yang saat ini menjadi andalan dalam mendongkrak ekonomi wilayah Kabupaten Kutai Timur masih terfokus pada sektor pertambangan. Meskipun potensi sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan sangat besar namun sampai saat ini belum dieksploitasi secara optimal sehingga belum mampu dijadikan tumpuan bagi peningkatan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bidang yang diharapkan akan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi Kabupaten Kutai Timur ini antara lain masih rendahnya tingkat penerapan teknologi yang mengakibatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan belum optimal.

IV.3. Lingkungan Hidup :

Dengan potensi sumberdaya alamnya yang begitu besar selain berdampak ekonomi terutama terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Timur, juga membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang bijak telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sudah cukup mengkhawatirkan kelestarian alam. Beberapa kegiatan yang rawan berakibat kerusakan lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan dan konversi hutan menjadi lahan pertanian.

Kabupaten Kutai Timur memiliki hutan 57,87% dari keseluruhan luas wilayah dan sebagian merupakan kawasan lindung. Di kawasan lindung ini terkandung sumberdaya andalan Kutai Timur yang berupa batu bara, minyak bumi, emas dan batu gamping (Semenanjung Mangkaliat). Kombinasi keruangan yang paling rawan ialah batubara dan hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan di formasi inilah yang telah menghasilkan bencana kebakaran berkepanjangan di wilayah Kalimantan Timur. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997/1998 telah memusnahkan 1.7696.090 ha hutan di Kutai Timur (IFFM 1999), yang menyebabkan kerugian ekologis berupa rusaknya habitat satwa langka serta berkurangnya keanekaragaman hayati.

Dampak negatif lainnya yang terlihat saat ini di wilayah Kabupaten Kutai Timur akibat kurang arifnya pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam oleh sebagian masyarakat Kutai Timur antara lain kerusakan kawasan pesisir akibat konversi lahan menjadi area permukiman dan tambak atau yang lainnya telah menyebabkan perubahan ekosistem hutan bakau.

IV.4. Agribisnis :

Bila ditinjau dari produksi beberapa komoditi pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan selama beberapa tahun terakhir yang cenderung menunjukkan penurunan, maka kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan produk komoditi pertanian masih kurang memperhatikan pemeliharaan lingkungan. Kenyataan tersebut akan mengurangi kemampuan berkembangnya sistem agribisnis secara keseluruhan termasuk tidak terjaminnya keberlanjutan pengembangan agribisnis itu sendiri.

Pada sisi lain tampak pula bahwa masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan misalnya dari 17.536 ha lahan sawah hanya 28% atau 4.938 ha saja yang dimanfaatkan sedangkan sisanya masih berupa lahan tidur. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa masyarakat terutama petani di daerah ini masih belum mampu memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Dari sisi ekonomi hal

tersebut menunjukkan masih terjadi *under-capacity* dari sistem agribisnis yang secara umum akan menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan sumberdaya.

V. ANALISIS SWOT

Dari data dan informasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (KEKEPAN) yang secara dinamis berkembang dari waktu ke waktu dalam periode 5 tahun RPJM-D Kabupaten Kutai Timur 2006-2010 perlu dilakukan peninjauan tentang strategi pengembangan/perkembangan daerahnya yang sesuai dengan tingkat berkecamuknya kehidupan yang berubah dan berkembang.

Secara operasional upaya pembinaan ketatalaksanaan di tingkat lokal sangat perlu untuk ditemukan:

- a. Strategi pembangunan yang offensif (SO) ;
- b. Strategi pembangunan yang pembalikan (WO) ;
- c. Strategi pembangunan yang diversifikasi (ST) ;
- d. Strategi pembangunan yang pertahanan (WT).

Tabel
ANALISIS SWOT UNTUK MASA 5 TAHUN RPJM-D KABUPATEN KUTAI TIMUR 2006-2010

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S) - UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah - Semangat kehidupan sebagai daerah otonomi baru - Aparatur yang relatif masih muda, memiliki etos kerja yang tinggi - Potensi perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebagai generator pengembangan - Dukungan masyarakat yang cukup tinggi - Prestasi/prestise wilayah dalam konteks jalinan semangat kejuangan bangsa - Potensi unggulan yaitu : perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kelautan - Penduduk Kutai Timur yang multi etnis sebagai pengkayaan budaya - SDM aparatur pemerintahan yang (relatif) berpendidikan tinggi - Potensi hidrologi yang cukup besar	KELEMAHAN (W) - Jumlah penduduk yang sedikit di samping kualitas sumberdaya manusianya yang relatif masih rendah - Sifat kehidupan masyarakat yang masih agraris tradisional - Masih sedikitnya lahan terbangun dan terbesar terkelompok di pinggiran sungai dan jalan raya - Sedikitnya sarana prasarana wilayah dan kondisi keterisolasian sebagian wilayah - Lapisan tanah berpotensi gambut, tetapi kurang mendukung untuk upaya produksi pertanian dan rawan erosi - Keterbatasan sarana & prasarana/infrastruktur - Fisik wilayah belum terjalin dalam satu kesatuan sistem teritorial - Perubahan perilaku masyarakat dalam sifat hidup tradisional ke arah agraris bisnis -agraris industrial
PELUANG (O) - Ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk dikembangkan - Banyak alternatif untuk upaya pengembangan wilayah - Permintaan pasar akan hasil agribisnis dan agroindustri - Permintaan pasar akan hasil tambang - Dimilikinya fasilitas pelabuhan untuk pembentukan jaringan kerja eksternal - Posisi wilayah relatif masih mudah terjangkau dalam konteks hubungan internasional	STRATEGI SO (offensif) - Melancarkan AGRIBISNIS & AGROINDUSTRI - Pembangunan SDM untuk modal dasar pembangunan modal sosial - Pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi dan produksi - Pengembangan kawasan-kawasan dengan kekuatan cluster ekonomi lokal - Pembangunan prasarana dan sarana untuk pengembangan ekonomi wilayah - Pengembangan kelembagaan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat - Konsentrasi pada komoditas lokal untuk produksi kawasan-kawasan	STRATEGI WO (pembalikan) - Mendorong partisipasi masyarakat untuk berusaha secara mandiri - Pembenahan kelembagaan desa sebagai basis pengembangan ekonomi lokal - Pengembangan sarana pelayanan keliling untuk pemberdayaan masyarakat - Penguatan modal pada kelompok usaha bersama - Pemberian bantuan teknis pengembangan kawasan produktif - Pengembangan jaringan kerjasama antar kelompok pelaku usaha komoditas

Lanjutan tabel 3.1.

ANCAMAN (T) a. Persaingan dalam hal yang sama dengan kabupaten lain b. Perubahan pola kerja sentralistik yang serba tertuntun ke arah gerak proaktif-desentralistik penuh dinamika c. Globalisasi yang mengakibatkan persaingan ketat d. Upaya industrial yang dikotomi dengan konteks pembangunan yang berwawasan lingkungan	STRATEGI ST (diversifikasi) a. Pengembangan pust-pusat SWP dengan perkuatan fungsi yang sudah ada b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur kecamatan untuk menjadi lebih mandiri dan proaktif c. Pemberdayaan organisasi masyarakat (LSM) untuk menjadi leader produksi d. Pengembangan armada angkutan desa untuk pemasaran produksi desa e. Pembangunan kawasan agropolitan berbasis produksi lokal	STRATEGI WT (pertahanan) a. Pembinaan generasi muda untuk cinta desa dan jadi pelaku produksi lokal b. Pengembangan kelompok usaha bersama dalam lingkup kecamatan c. Penguatan lembaga desa dan kecamatan untuk jadi produsen lokal d. Penyediaan juklak-juknis dan pedoman teknis untuk usaha lokal kemitraan e. Pembinaan kelompok jaringan kerja pemasaran lintas wilayah f. Bantuan desa untuk kelancaran produksi ekonomi lokal
--	---	--

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

**SKENARIO PENGEMBANGAN VISI, MISI
DAN KETERKAITAN DENGAN RTRW**

I. SKENARIO PENGEMBANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR 2006-2010

Sebagai upaya membuat skenario pengembangan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat diungkapkan pemikiran berikut :

- a. Skenario adalah suatu perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa depan, juga suatu rancangan rekayasa sesuatu tindakan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan terjadi di masa depan; atau merupakan suatu garis besar dramatika yang memberikan gambaran karakter dan situasi serta tindakan di dalam urutan dimana peristiwa itu terjadi ;
- b. Pengembangan jangka menengah adalah suatu alat yang memberikan/menggunakan skenario untuk merangsang pemikiran kritis dan (kemungkinan) perdebatan publik tentang keadaan di masa depan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ;
- c. Skenario pengembangan jangka menengah diberi arti sebagai suatu cerita naratif yang menantang/merangsang pemikiran kritis dan perdebatan publik dan masuk akal yang menggambarkan lorong-lorong pilihan yang mungkin/bisa terjadi menuju ke arah suatu kondisi masa depan.

Unsur-unsur skenario dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Suatu tafsiran atas situasi kini
- b. Suatu bayangan/citra tentang situasi masa depan
- c. Suatu cerita naratif secara internal-konsisten tentang lorong-lorong perjalanan kehidupan dari masa kini ke masa depan

Tujuan perencanaan skenario:

- a. Mengidentifikasi isu/masalah/tantangan
- b. Mengidentifikasi isu utama
- c. Mengembangkan skenario, yang :
 - (1) Memiliki daya tarik/rangsangan kritis
 - (2) Mempunyai kemungkinan terjadi
 - (3) Memusatkan perhatian ke masa depan

Kegunaan perencanaan skenario:

- a. Menghindari keterkejutan dan menyiapkan diri (masyarakat dan wilayah) untuk menghadapi berbagai kemungkinan
- b. Merancang strategi yang sehat dan masuk akal
- c. Merangsang pemikiran kritis dan perdebatan publik dalam hal :
 - (1) Memusatkan perhatian pada masa depan, bukannya pada masa kini dan masa lampau.
 - (2) Memusatkan perhatian pada apa yang bisa/mungkin terjadi, bukannya pada apa yang harus atau diharapkan terjadi.

Sebagai titik masuk ke arah Skenario Pengembangan Jangka Menengah untuk 5 tahun, diperlukan ada *langkah pemaparan penyusunan skenario jangka panjang* dari RPJP-D Kabupaten Kutai Timur yang telah disusun terdahulu :

- a. menciptakan suasana dan pemikiran terbuka untuk proses pembelajaran bersama membayangkan situasi masa depan jangka panjang ;
- b. menentukan pusat kepedulian (*focal concern*) ;
- c. mengidentifikasi faktor/kekuatan pendorong (*driving forces*) ;
- d. menganalisis faktor kunci dan menentukan mana yang paling penting dan sangat tidak tentu (*uncertain*), namun menjadi garis lorong waktu yang dominan ; dan
- e. Memilih kekuatan pendorong yang kritikal untuk menyusun kerangka skenario yang logis.

Penafsiran Skenario Pengembangan Jangka Panjang dan Menengah bagi masa depan Kabupaten Kutai Timur dapat dicermati pada Diagram berikut :

Diagram I.1.
PENAFSIRAN SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

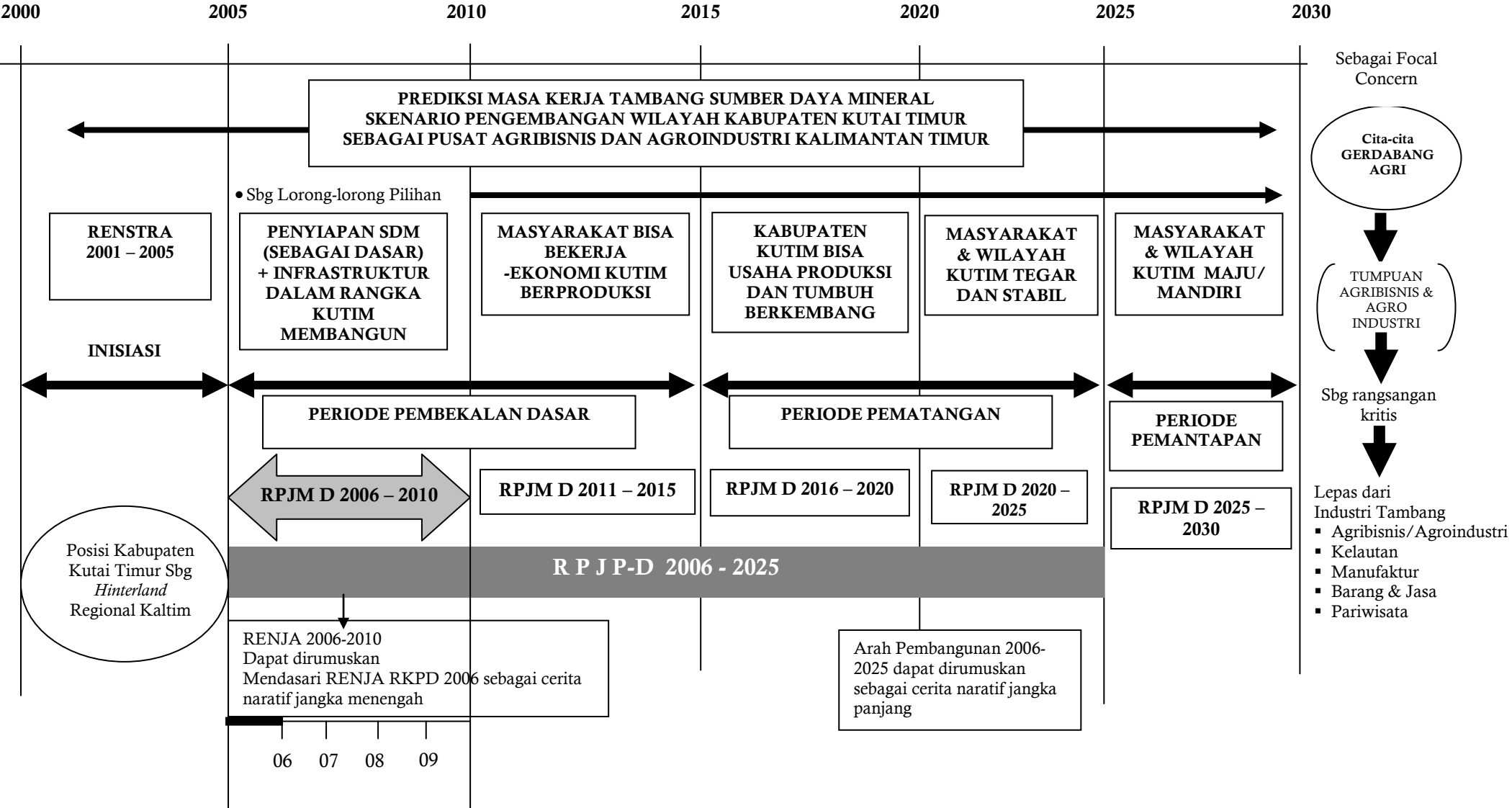


Diagram I.2.
POSISI STRATEGIS KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM KERANGKA SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

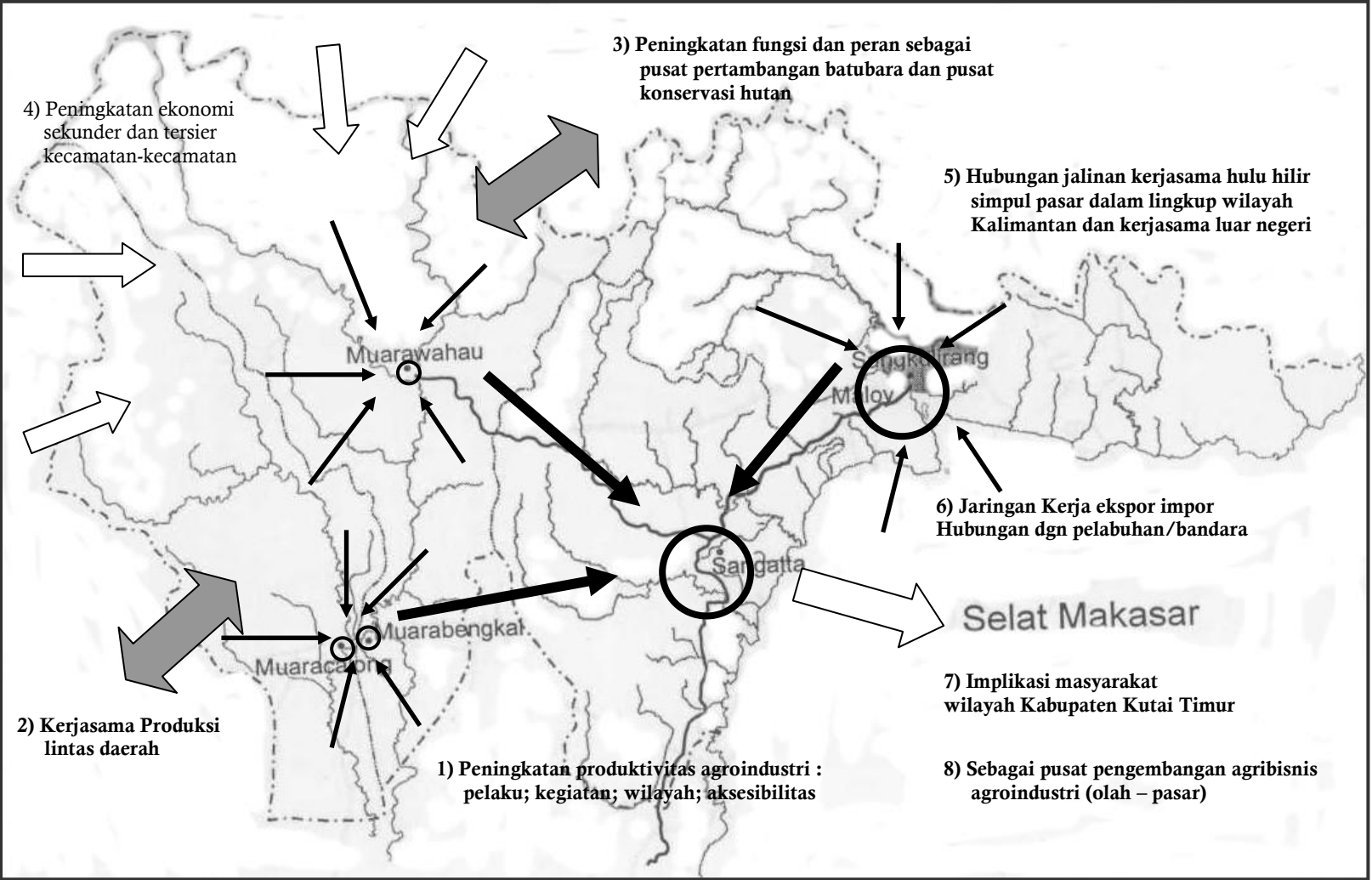


Diagram I.3.
PENAFSIRAN SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2006-2010



II. NARASI PENJELASAN DIAGRAM SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

II.1. Umum :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur dimaksudkan untuk menata keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bagian upaya pembangunan daerah yang lalu (tahun 2001-2005) untuk masa 20 tahun mendatang.

Skenario pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada asumsi masa kerja tambang yang diperkirakan akan habis dalam jangka 30 tahun mendatang. Beberapa pemikiran pengembangan Kabupaten Kutai Timur pasca tambang antara lain pengembangan industri di luar industri tambang, pelayanan jasa dan potensi agribisnis yang selama ini belum optimal dimanfaatkan, di samping kelautan, manufaktur, barang dan jasa, serta pariwisata.

Periode pertama, merupakan **periode inisiasi** dimana komitmen pembangunan Kabupaten Kutai Timur telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Kutai Timur 2001-2005. Sebagai langkah awal dalam **periode pembekalan dasar** dari tahun 2005-2010 adalah penyiapan sumberdaya manusia (SDM) di mana pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan sebagai kerangka dasar Kabupaten Kutai Timur dalam memiliki pelaku-pelaku pembangunan yang handal yang ditujukan bagi generasi yang akan datang dan juga generasi muda saat ini.

Periode selanjutnya adalah **periode pematangan**. Dalam periode ini diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di mana produksi keluarga dapat menjadi produksi wilayah kemudian produksi menyeluruh.

Tahap terakhir dari skenario jangka panjang adalah **periode pemantapan** dimana masyarakat dan kota telah menjadi tegar dan maju dalam artian siap dalam melakukan pembaharuan menangkap visi sebagai pusat agribisnis dan agroindustri bagi Kalimantan Timur dan wilayah yang lebih luas.

II.2. Dasar Pemikiran Teknis – Substantif :

- a. Tumpuan pada konteks 'pengembangan manusia' dari yang belum 'bisa' sampai dengan 'berproduksi untuk keluarga' ke arah 'berproduksi untuk wilayah' ;
- b. Bahwa manusia yang belum mengerti sesuatu perlu mendapat 'penalaran' dan 'ketrampilan' untuk bisa memahami dan mengerjakan sesuatu. Dengan itu diharapkan si manusia itu akan memanfaatkan 'kemampuan mengerjakan sesuatu' → untuk 'bekerja demi kehidupannya dan keluarga'. Dari upaya bekerja ini si manusia itu akan mendapatkan 'pendapatan' untuk kehidupan dan penghidupannya, dan karena itu ia bisa melakukan kegiatan 'ekonomi keluarga'. Apabila sejumlah besar kelompok manusia/penduduk wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi → akan terbentuk kegiatan ekonomi wilayah. Artinya wilayah ini akan bergiat nyata dalam berproduksi → berinteraksi antar wilayah dalam mencukupi kebutuhan wilayah, dan menciptakan kehidupan ekonomi wilayah lebih luas (regional). Dalam kondisi **interaktif** antar wilayah → suatu *region* akan menjadi **tegar** dalam berproses kehidupan dan penghidupannya. Lama kelamaan proses kehidupan dan penghidupan berlangsung **stabil** dan tegar (mampu

menghadapi berbagai kemungkinan) suatu *region* ini akan menjadi **maju** (dalam arti akan terus berkembang) secara kuantitas dan kualitas.

- c. Keseluruhan konteks proses kehidupan-penghidupan *region* ini tentu akan berlangsung dalam kurun waktu panjang. Dan secara logika perjalanan panjang (perkembangan) ini dapat diungkapkan dalam tahap-tahap proses perkembangan. Manusia memiliki tahap proses perkembangan anak – dewasa – tua – lanjut usia. Wilayah juga mengenal tahap proses perkembangan: awal – muda – kembang matang – dan lanjut.

■ **Diagram Penafsiran Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur :**

- a. Sebagai *Focal Concern* 'Pasca SDA Tambang' → krisis → drop → tumpuan ekonomi wilayah Kabupaten Kutai Timur hilang (skenario dramatika) Kabupaten Kutai Timur dan masyarakatnya **harus** berbuat sesuatu saat lepas dari industri tambang (sebagai rangsangan kritis) → tumpuan harapan: mengembangkan kegiatan agribisnis dan agroindustri, kelautan, manufaktur, barang dan jasa, serta pariwisata, (yang harus direkayasa meminta kepedulian industri tambang untuk peduli mengembangkan industri menengah dan kecil → sejak saat dini). Hal ini dipandang sebagai visi jangka panjang ;
- b. Situasi kondisi Kabupaten Kutai Timur yang lepas dari status kabupaten agraris murni ke arah agribisnis agroindustri menjadi **daerah otonom** dengan semangat GERDABANGAGRInya, dipandang sebagai wilayah **awal** dengan memiliki upaya 'Propeda + Renstra Kabupaten Kutai Timur 2001-2005' ini sebagai upaya inisiasi membangun 'anak muda' melalui kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama 2001-2005. Harapan secara **normatif** dari sifat **posisi geografisnya** Kabupaten Kutai Timur berada pada 'poros regional lintas Trans Kaltim dan poros segitiga pertumbuhan BONSA SEMAWA-TANRE MAWA-PANDARONG' (realita memang sudah begitu) ;
- c. Dalam upaya memprediksi kehidupan Kabupaten Kutai Timur ke depan dapat diaplikasikan pemikiran 'pembelajaran anak manusia' menapaki proses 'pengembangan penalaran dan ketrampilannya' melalui 'bersekolah diri' sebagai lorong-lorong pilihan jalan hidup menggapai pematangan diri dan pendewasaan manusia. Masa 10 tahun (2001-2010) seperti proses pembelajaran SD-SLTP merupakan pembekalan dasar untuk memilih 'jurusan minat'. Dengan telah diasumsikan masa inisiasi 5 tahun pertama perlu ditambahkan upaya penyiapan SDM sebagai dasar pembangunan anak muda. Tentu fokus SDM ini perlu dilengkapi dengan infrastruktur sebagai persyaratan SDM memerlukan prasarana untuk bisa melakukan sesuatu upaya membangun wilayah ;
- d. Sebagai kelanjutan mengembangkan anak muda menjadi anak dewasa, masa 10 tahun ke depan lagi yang diasumsikan sebagai masa belajar tingkat SLTA dan tingkat pendidikan tinggi, dianggap sebagai upaya/tahap pematangan diri. Dengan masyarakat yang sudah dipersiapkan SDM + infrastrukturnya selama 2006-2010 (untuk masukan RPJM-D Kabupaten Kutai Timur 2006-2010) pada periode 2011-2015 diharapkan 'Masyarakat Kutai Timurr' bisa **bekerja** dan mengembangkan ekonomi wilayahnya. Untuk hal ini tentu dipersyaratkan bahwa sesudah memiliki **kecerdasan** tertentu, masyarakat harus **sehat** jasmani+rohani, dan tentunya dapat mengantisipasi **menghilangkan jeratan kemiskinan** memanfaatkan upaya interaksi antar kelompok masyarakat – antar bagian wilayah kabupaten dan jaringan kerjasama ekonomi kabupaten dengan wilayah sekitarnya ;

- e. Apabila masyarakatnya dan bagian wilayah kabupaten sudah sama-sama melakukan kegiatan '**ekonomi wilayah**' harapannya secara sinergis Kabupaten Kutai Timur telah bisa **berusaha** hidup dengan **berproduksi aktif** (menjalin interaksi internal dan eksternal) dalam memposisikan diri sebagai 'hinterland agribisnis dan agroindustri' dalam konteks regional Kaltim. Kabupaten Kutai Timur sebagai 'anak manusia berstatus **sarjana**/selesai perguruan tinggi' tentu sudah memiliki **identitas** dan **karakter** tertentu pilihannya yaitu 'simpul yang proaktif' dalam konteks kehidupan wilayah lebih luas, dalam masa 2016-2020 itu ;
- f. Nah, si anak dewasa setelah selesai dari pendidikan tingginya, perlu memasuki 'periode pemantapan' 2021-2030. Diasumsikan pada masa 2021-2025 masyarakat dan Kabupaten Kutai Timur dengan berbagai upaya pembangunan yang lebih berbobot kualitas manusia dan lingkungannya diharapkan dapat '**bertegar diri**' (mampu mengantisipasi suasana ekonomi apapun) untuk tetap tegak berdiri menciptakan **Kabupaten Kutai Timur mandiri** (secara ekonomi/politis/sosial budaya/pemerintahan) menikmati sifat **otonom** dan **desentralisasi** kehidupannya. Pada masa selanjutnya, 2026-2030 dengan upaya pemantapan berbagai bidang diangankan masyarakat dan Kabupaten Kutai Timur menjadi **maju** secara keseluruhannya (kuantitatif dan kualitatif) ;
- g. Dari skenario dramatika 2001-2030 kehidupan masyarakat dan Kabupaten Kutai Timur seperti itu 'impiannya' diharapkan bisa disinkronkan bagaimana arah kebijakan umum (AKU) dari arah bawah RPKD 2006 (tahun pertama dari RPJM-D) dikembangkan jadi AKU RPJM-D 2006-2010 dan diproyeksikan ke arah AKU RPJP-D 2006-2025. Di sisi lain secara bersamaan juga harus dibawa mendarat rumusan AKU RPJP-D 2006-2025 atas cerita naratif dari impian drama jangka panjang → dijabarkan ke AKU RPJM-D 2006-2010 dan juga di-bumi-kan untuk AKU RPKD 2006 (arah atas turun ke bawah). Ya, upaya mempertemukan upaya *bottom-up* dan upaya *top-down* ini merupakan suatu 'seni menciptakan nasib anak manusia' (meramalkan kehidupan anak manusia pada satuan waktu dan satuan tempat tertentu)

■ **Diagram Posisi Strategis Kabupaten Kutai Timur dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang :**

- a. Dari Visi Bupati Kutai Timur Terpilih dan Visi Renstra/Propeda Kabupaten Kutai Timur 2001-2005 yang lalu, diambil posisi geografis Kabupaten Kutai Timur dalam konteks wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai "pusat agribisnis dan agroindustri" – Kaltim. Hal ini dipakai **TUJUAN** pembangunan/**VISI** membangun Kabupaten Kutai Timur **saat ini** dan **jangka panjang** ;
- b. Untuk mencapai tujuan/visi ke depan tersebut diramalkan ada **lorong waktu** yang perlu dipilih dilalui, dan itu atas dasar kekuatan konteks posisi hinterland dalam wilayah yang lebih luas yang disandang Kabupaten Kutai Timur → sebagai jalur pendorong **garis kritikal** dalam **8 langkah** sub-skenario **logis-strategis**. Sifat kritikal – logis – strategis karena merupakan penentu dan menurut logika perkembangan wilayah – dan strategis dalam menggapai impian masa depan ;
- c. Dapat digambarkan pada situasi saat ini posisi Kabupaten Kutai Timur sebagai titik awal dan sekaligus sebagai titik tujuan dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda (cerminan anak muda ke arah manusia dewasa/matang/lanjut). Yaitu:

langkah (1) pusat agribisnis dan agroindustri provinsi Kaltim, sebagai sikon awal dan sebagai sikon tujuan/akhir skenario. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan persyaratan kerja sungguh-sungguh (diprogramkan dan direalisasikan perwujudannya) dengan 8 langkah berikutnya.

- 1). Langkah (1) : diperlukan peningkatan produktivitas agroindustri → pelaku, kegiatan, wilayah, aksesibilitas.
- 2). Langkah (2) : diperlukan pembentukan/penjalinan kerjasama lintas kabupaten-kota secara regional Kaltim, akan mempersyaratkan kelembagaan – mekanisme kerja – SDM – perangkat dan sumberdaya lain guna mengoperasikan 'kerjasama pembangunan' tersebut.
- 3). Langkah (3) : perlunya peningkatan fungsi dan peran sebagai pusat pertambangan batubara dan pusat konservasi hutan.
- 4). Langkah (4) : upaya peningkatan ekonomi sekunder dan tersier kecamatan-kecamatan. Dengan semua *hinterland* yang dapat dijangkau, menciptakan alur sistem hubungan simpul dan *hinterland*, diperlukan menjalin upaya **korporasi** kegiatan **Agribisnis-Agroindustri** di wilayah simpul dan *hinterland*, tentu dengan pusat hinterland di Kabupaten Kutai Timur. Berbagai upaya dapat di-'kerja-korporasi'-kan dalam kegiatan pertanian umum (*corporate farming*) – produksi – perdagangan lintas wilayah (*corporate business*) dengan menciptakan secara berjenjang sub hinterland-simpul-koleksi-distribusi. Akan dapat tercipta "multi – aksi – sektor – lintas wilayah".
- 5). Langkah (5): meski perlahan tapi pasti dari upaya di wilayah simpul-simpul (sejauh upaya dan tebaran jangkauan) perlu diupayakan **penjalinan kerjasama** hinterland hulu – hilir – simpul – konsumen – pasar dalam lingkup wilayah Kalimantan dan kerjasama luar negeri dengan berbagai kegiatan bisnis yang mungkin (misal : *corporate agribusiness*, *corporate market networking*) menciptakan **jaringan kerja pemasaran** : transportasi – depo transit/terminal agribisnis dan lain-lain sehingga selalu ada arus barang/jasa/manusia antara *hinterland* – simpul (hubungan desa-kota).
- 6). Langkah (6) : upaya menciptakan jaringan kerja ekspor impor → hubungan dengan pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang dimiliki dan yang ada di wilayah sekitar.
- 7). Langkah (7) : Implikasi bagi masyarakat dan Kabupaten Kutai Timur secara internal akan terbiasakan menjadi **pelaku proaktif** dalam tata laku ekonomi regional. Tentunya dengan dukungan infrastrukural dan sumberdaya-sumberdaya yang diupayakan berkembang dari waktu ke waktu (harapan meningkat kuantitas-kualitas). Dari anak muda – menjadi dewasa – menjadi matang dalam **berproduksi untuk keluarga – berproduksi untuk wilayah/kota**.
- 8). Langkah (8): Wujudkan – **terwujudnya visi-misi** Kabupaten Kutai Timur. Secara integratif-sinergis langkah-langkah sebelumnya yang selalu diupayakan meningkat kuantitas dan kualitas – diasumsikan akan menggapai impian masa depan secara bertahap pula/berjenjang namun pasti, ke arah 'pusat pengembangan agribisnis dan agroindustri'. Secara nyata diharapkan Kabupaten Kutai Timur betul-betul merupakan pusat **pengembangan agribisnis dan agroindustri** (olah-pasar) dalam **Konteks Regional Kalimantan Timur** bahkan **nasional** dan **internasional**, dengan upaya *corporate exporting* yang memiliki jaringan kerja besar ekspor/impor dalam negeri dan luar negeri.

4.2.1. Hubungan Skenario Jangka Panjang dan Skenario Jangka Menengah

- a. Skenario Jangka Panjang memiliki dimensi waktu 20 tahun, yang di dalamnya juga memiliki tahapan dan pembagian ke dimensi waktu 5 (lima) tahunan. Dengan logika seperti itu dapat dicermati bahwa upaya pengembangan wilayah dalam jangka panjang tersebut sangat dapat diupayakan operasionalnya sebesar seperlima porsi perkembangan yang bisa ditangani pada periode 5 (lima) tahun pertama. Seperti itu, artinya topik 5 (lima) tahunan dapat diramalkan riil dilakukan oleh setiap komponen pengembangan. Hal ini bisa jadi **jabaran Visi dan Misi Daerah** untuk 5 (lima) tahunan dapat ditangkap sebagai **Visi Misi RPJMD** nantinya.
- b. Skenario Jangka Menengah memiliki dimensi waktu 5 (lima) tahun, yang telah mendapat porsi jabaran dari RPJPD-nya. Analogi dengan itu, selama tahunannya juga dapat ditarik jabaran tema/visi tahunan. Diagram 4.3. dapat memberikan adanya tema/visi tahunan itu. Hal ini dapat dipakai sebagai arahan pembangunan setiap tahunnya.

III. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR 2006-2010

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2006-2010 :

Pembangunan Daerah yang bertumpu pada pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Kalimantan Timur.

IV. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR 2006-2010

Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2006-2010 :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang adil, makmur dan sejahtera dengan sumberdaya manusia yang beriman, taat beribadah, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil.
4. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sehingga cerdas, berdisiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dan terampil.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menyediakan jaringan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.

6. Meningkatkan dan membina pemahaman dan pengamalan ajaran agama, sehingga terwujudnya toleransi antar umat beragama, intern umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki integritas, profesional dan percaya diri sehingga dapat menciptakan *good governance*, dan terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta memberantas segala bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
8. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah dan melaksanakan *grand strategy* GERDABANGAGRI.
9. Pengembangan sarana dan prasarana dan infrastruktur ekonomi serta membuka isolasi wilayah yang terbelakang, terpencil dan daerah pedalaman.
10. Meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan desentralisasi otonomi daerah dan meningkatkan sistem dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
11. Melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi investor sehingga terbuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
12. Menfasilitasi para petani dan nelayan sebagai pelaku utama agribisnis untuk memperoleh lahan, kemudahan dalam meningkatkan produksi, mengolah dan memasarkan hasil panen.
13. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis.
14. Memantapkan manajemen pengelolaan sumberdaya alam sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Kutai Timur dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
15. Memantapkan dan memanfaatkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan antar wilayah kecamatan dan pengembangan perwilayahan komoditi.
16. Menegakkan hukum agar terwujud kepastian hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
17. Mempercepat pengurangan angka kemiskinan/pengentasan masyarakat miskin.

V. KETERKAITAN DENGAN RTRW KABUPATEN KUTAI TIMUR

Peran sub-wilayah pembangunan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat berdasarkan penyusunan dan klasifikasi fungsi hirarki kota-kota di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Rencana hierarki kota-kota di Kabupaten Kutai Timur adalah:

- | | |
|-------------|---|
| Hirarki I | : Sangatta |
| Hirarki II | : Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Bengkal |
| Hirarki III | : Muara Ancalong dan Bengalon |
| Hirarki IV | : Kaliorang, Sandaran, Busang, Telen dan Kongbeng |

Klasifikasi fungsi hierarki kota-kota di wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

- Hirarki I : Pusat Pengembangan Wilayah
- Hirarki II : Pusat Pengembangan Antar Sub-Wilayah (PPAS-W)
- Hirarki III : Pusat Pelayanan Lokal (satu atau beberapa kecamatan)
- Hirarki IV : Pusat Pelayanan Lokal (satu kecamatan)

Sangatta sebagai Pusat Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan jasa pelayanan keuangan atau bank untuk melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan ;
- b. Pusat pengolahan atau pengumpulan barang-barang yang melayani beberapa kecamatan ;
- c. Simpul transportasi beberapa kecamatan ; dan
- d. Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya.

Sangatta sebagai pusat pengembangan wilayah kabupaten, selain itu juga pada sub wilayah pembangunan tengah (A).

Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Bengkal sebagai Pusat Pengembangan Antar Sub-Wilayah (PPAS-W) mempunyai fungsi pelayanan sebagai berikut :

- a. Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan atau bank beberapa kecamatan ;
- b. Pusat pengolahan atau pengumpul barang-barang yang melayani beberapa kecamatan ;
- c. Pusat jasa transportasi beberapa kecamatan ; dan
- d. Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya.

Muara Ancalong dan Bengalon sebagai Pusat Pelayanan Lokal dengan skala pelayanan beberapa kecamatan mempunyai fungsi pelayanan sebagai berikut :

- a. Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan atau bank untuk melayani beberapa kecamatan ;
- b. Pusat pengolahan atau pengumpulan barang-barang yang melayani beberapa kecamatan ;
- c. Pusat jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan ; dan
- d. Simpul transportasi beberapa kecamatan.

Kecamatan Busang, Telen, Kongbeng, Sandaran dan Kaliorang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan lokal yaitu melayani wilayah di belakangnya dalam lingkup administrasi kecamatannya sendiri dengan fungsi:

- a. Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan atau bank melayani satu kecamatan ;
- b. Pusat pengolahan atau pengumpulan barang-barang yang melayani satu kecamatan ;
- c. Simpul transportasi beberapa desa ; dan
- d. Pusat jasa pemerintahan untuk kecamatan.

Sangkulirang sebagai Pusat Pengembangan Antar Sub Wilayah (PPAS-W) dan sebagai Pusat Pengembangan Sub Wilayah Pembangunan Timur Laut (B).

Muara Wahau dan **Muara Bengkal** yang juga merupakan Pusat Pengembangan Antar Sub Wilayah (PPAS-W) juga sebagai Pusat Pengembangan Sub Wilayah Pembangunan Barat (c).

Sub wilayah pembangunan A, B dan C dapat digambarkan pada gambar berikut :

BUPATI KUTAI TIMUR,

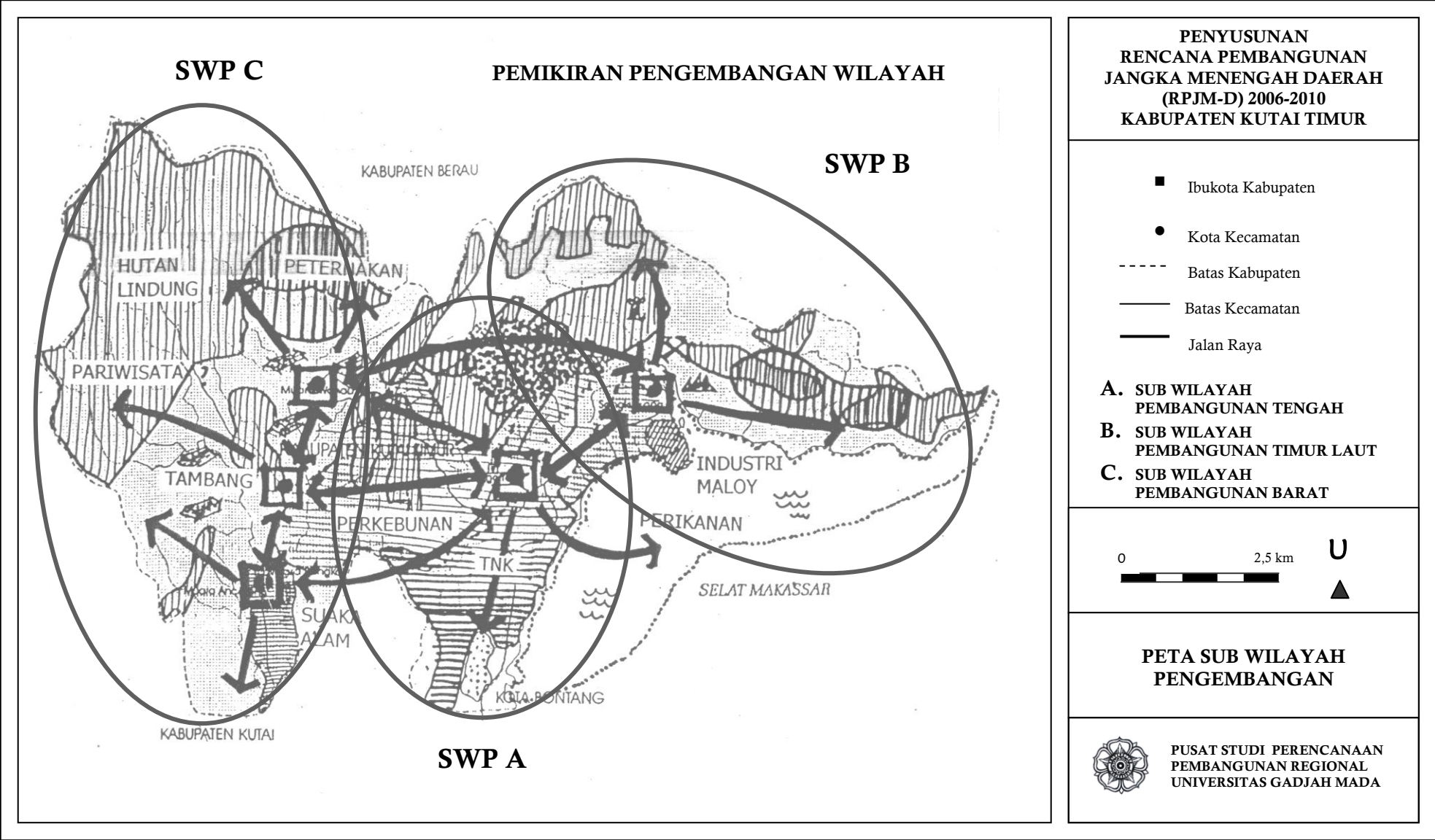
H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

Gambar
Peta Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Kutai Timur



STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENGANTAR

Di dalam banyak literatur studi pembangunan, dikenal adanya tiga strategi utama pembangunan, yaitu :

1. Strategi Pembangunan Yang Mementingkan Pertumbuhan
 - a. Strategi Pertumbuhan ;
 - b. Strategi Pertumbuhan dengan Pemerataan.
2. Strategi Pembangunan Yang Mementingkan Kebutuhan Pokok.
3. Strategi Pembangunan Yang Mementingkan Harkat dan Martabat Manusia.

David Korten, sebagaimana dikutip oleh Tjokrowinoto (2004) memetakan karakteristik masing-masing strategi pembangunan. Karakteristik ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. fokus ;
2. nilai ;
3. indikator ;
4. peran pemerintah ;
5. sumber utama ; dan
6. kendala.

Adapun perbedaan ketiga pendekatan pembangunan berdasarkan karakteristik tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Karakteristik	Strategi Pembangunan		
	Pertumbuhan	Pemenuhan Kebutuhan Pokok	Harkat dan Martabat Manusia
Fokus	Industri	Pelayanan	Manusia
Nilai	Berpusat pada industri	Berkiblat pada manusia	Berpusat pada manusia
Indikator	Ekonomi makro	Indikator sosial	Hubungan manusia dengan sumber
Peran Pemerintah	Entrepreneur	Service Provider	Enabler atau facilitator
Sumber Utama	Modal	Kemampuan administratif & anggaran	Kreativitas dan komitmen
Kendala	Konsentrasi dan marginalisasi	Keterbatasan anggaran dan inkompetensi aparat	Struktur dan prosedur yang tidak mendukung

Sumber: Tjokrowinoto (2004: 26)

Dalam perkembangannya muncul beberapa strategi pembangunan lain, seperti misalnya: (a) strategi pembangunan yang mementingkan kelestarian lingkungan ; (b) strategi yang mementingkan independensi. Oleh karena strategi yang mementingkan kelestarian alam sangat penting, maka sub bab berikut ini akan menguraikan secara lebih terperinci tentang strategi pembangunan yang mementingkan kelestarian lingkungan. Kemudian sub bab selanjutnya merekomendasikan strategi pembangunan yang sebaiknya diterapkan di Kabupaten Kutai Timur.

II. STRATEGI PEMBANGUNAN YANG MEMENTINGKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Strategi pembangunan yang mementingkan kelestarian lingkungan ini dikenal juga dengan sebutan pembangunan yang berkelanjutan. Fokus Pembangunan Berkelanjutan menuntut orientasi baru dalam pelayanan masyarakat, termasuk pula orientasi manajemennya. Dalam hal ini Manajemen Pelayanan Masyarakat adalah suatu proses kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemberian/penyediaan barang dan jasa dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat yang dilayani.

Pada umumnya, analisa kebijakan pembangunan menitikberatkan pada sumberdaya buatan yang dalam kenyataan sehari-hari paling mudah untuk diukur. Seiring dengan kecenderungan ini kekayaan secara bias diukur dari persediaan sumberdaya buatan, tanpa disadari bahwa usaha untuk meningkatkan “stock” sumberdaya buatan dapat mengurangi ketersediaan sumberdaya yang lain. Sedangkan sumberdaya alam merupakan aset yang memasok materi terbarukan maupun tak terbarukan, yang mungkin mempunyai harga pasar maupun tidak (Kuswartoyo: 1999: 17-27).

Sumberdaya adalah persediaan modal (*capital stock*) yang akan menjamin keberlanjutan upaya meningkatkan kualitas hidup secara terus-menerus. Dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan ini ada empat sumberdaya yang harus diperhitungkan yaitu: (1) sumberdaya buatan (seperti pabrik, infrastruktur); (2) sumberdaya alam; (3) sumberdaya manusia; dan (4) sumberdaya sosial (seperti kelembagaan dan kebudayaan).

Sumberdaya manusia juga memiliki peran yang penting dalam Pembangunan Berkelanjutan. Bahkan pada tiga dekade terakhir telah banyak kemajuan dicapai dengan pengakuan akan pentingnya pembentukan sumberdaya manusia. Investasi pada manusia sekarang. Pembangunan Berkelanjutan berarti menambah atau meningkatkan keempat bentuk sumberdaya tersebut atau paling tidak tetap seperti yang ada sekarang. Selain itu juga perlu dibuka pintu untuk melakukan substitusi dari satu bentuk sumberdaya ke bentuk lainnya, misalnya menurunnya persediaan sumberdaya minyak, disubstitusi dengan meningkatnya sumberdaya manusia melalui perbaikan sektor pendidikan.

Dalam kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan yang bertumpu (*focus*) pada manusia ada lima segi yang harus mendapat perhatian yaitu:

1. Pemberdayaan (*empowerment*): meningkatkan kemampuan untuk memilih dan membuka kesempatan untuk memilih. Secara lebih persisnya adalah peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama yang bersangkutan dengan kehidupan mereka sendiri.
2. Kerjasama (*co-operation*): membuka dan tidak menghalangi orang untuk melakukan kerjasama, berinteraksi dan saling mengisi kebutuhan batinnya dalam kehidupan yang bermutu dan mempunyai arti.
3. Keadilan (*equity*): meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk mengakses berbagai sumberdaya dan pelayanan.
4. Keberlanjutan (*sustainability*): hak generasi yang akan datang untuk bebas dari kemiskinan dan tetap memiliki hak pribadi.
5. Keamanan (*security*): terutama keamanan atas sumber penghidupannya.

Sumberdaya yang diperlukan untuk menopang dan mengembangkan kualitas hidup memang harus dikelola dengan baik, dimanfaatkan dan dialokasikan secara bijaksana. Kondisi yang demikian itu hanya dapat dicapai apabila ada pemerintahan (*governance*) yang mempunyai kemampuan yang memadai, yang mampu memadukan kekuatan sektor pemerintah, badan usaha dan masyarakat sipil. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila PBB memprioritaskan bantuannya pada pencapaian pemerintahan yang baik ini.

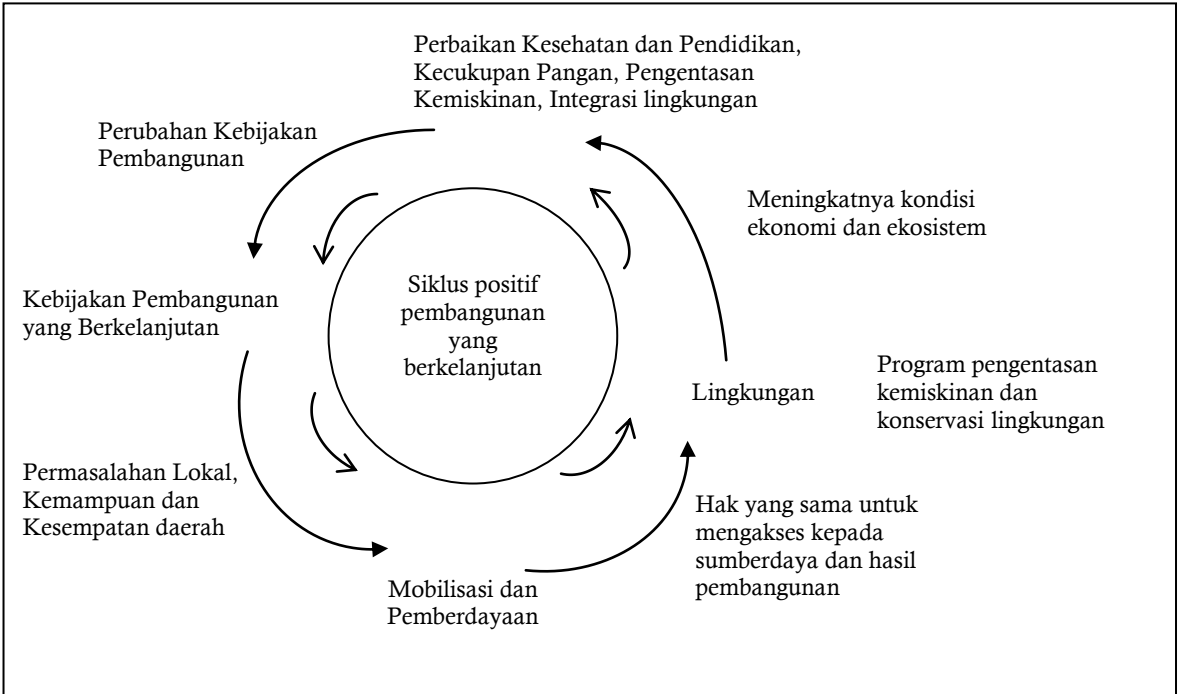
Pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, masing-masing pihak yang mempertaruhkan kemampuannya untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, harus memiliki sifat maupun wawasan sebagai berikut :

1. *Partisipatif* : semua anggota masyarakat dapat memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya secara konstruktif.
2. *Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan*: hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa pandang bulu.
3. *Transparansi*: adanya aliran informasi yang bebas; adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, dan informasi juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau.
4. *Daya tanggap (responsiveness)* : kemampuan kelembagaan untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
5. *Orientasi pada konsensus*: pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan untuk mencapai konsensus yang luas, mengakomodasikan kepentingan, dan kelompok mencari kemungkinannya dalam penentuan kebijakan dan prosedur.
6. *Bersikap adil* : semua orang mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
7. *Efektivitas dan efisiensi* : kelembagaan dan prosesnya membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana (*best use*).
8. *Akuntabilitas atau pertanggungjawaban* : pengambilan keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan yang bertanggungjawab pada publik dan para stakeholder. Akuntabilitas ini berbeda antara organisasi dan juga tergantung pada apakah keputusan itu diambil untuk keperluan internal atau eksternal.
9. *Visi strategik* : pemimpin dan publik harus memiliki perspektif yang luas dan jauh tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan, dan mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan.
10. *Profesionalisme* : setiap pemimpin dan publik harus bersikap profesional dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.

Pembangunan Berkelanjutan memerlukan upaya dan tindakan yang berkelanjutan menuju kondisi yang selalu menjadi lebih baik. Pemantauan, peninjauan kembali dan perencanaan ulang, pelaksanaan tindakan untuk kemudian dipantau lagi – ditinjau kembali apabila salah atau diteruskan apabila benar – merupakan siklus yang berkelanjutan. Sistem kehidupan yang kompleks menyebabkan proses itu bukan hanya proses yang beruntun tetapi merupakan proses

yang berjalan paralel, terdiri dari kegiatan yang beraneka ragam, ada yang berkaitan satu dengan lainnya ada yang berjalan sendiri-sendiri.

Walaupun demikian setiap tindakan dan langkah harus secara positif menuju kepada Pembangunan yang Berkelanjutan. Gambar berikut adalah skema tentang berbagai langkah dan tindakan yang dianggap mendukung siklus Pembangunan Berkelanjutan :



Walaupun dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan digunakan dan diterapkan asas yang universal, kondisi daerah harus sangat dipertimbangkan. Selain itu, skala kegiatan dan juga cakupan ruang yang menjadi lingkup perencanaan maupun pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, mengharuskan adanya pengutamaan atau penentuan prioritas mengenai fungsi dasar mana yang menjadi dasar perencanaan dan juga pelaksanaannya.

II.1. Pengembangan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Secara Berkelanjutan :

Pembangunan Berkelanjutan harus mengupayakan agar kualitas hidup manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat di daerah tersebut harus terus-menerus meningkat. Apa yang dimaksud dengan hidup yang berkualitas sebagai individu adalah mempunyai kemampuan untuk memilih. Semakin tinggi kualitas hidup seseorang artinya semakin mampu mereka memilih dan makin banyak yang dapat dipilih. Kondisi kesehatan atau pendidikan yang tidak baik dapat menyebabkan seseorang tidak mampu merumuskan keinginan dan menentukan pilihannya. Ini dapat diartikan bahwa kualitas hidupnya rendah. Sebaliknya, walaupun, misalnya, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memilih tetapi memiliki keterbatasan (atau bahkan tidak ada) pilihan, dapat juga diartikan bahwa kualitas hidupnya rendah.

Dengan pandangan ini maka yang disebut dengan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan adalah upaya untuk: Pertama, meningkatkan kemampuan untuk melakukan pilihan. Kedua, mengembangkan iklim yang memungkinkan dapat melakukan pilihan secara baik artinya membuka

kesempatan untuk melakukan pilihan. Ketiga, menyediakan semakin banyak banyak barang, jasa dan aktivitas yang dapat dipilih, termasuk barang-barang yang disediakan alam. Polusi dan kemerosotan unsur alam, misalnya pencemaran air yang menyebabkan merosotnya populasi ikan, dapat diartikan mengurangi persediaan barang yang dapat dipilih.

Selain meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai perorangan, berkaitan dengan masalah pergaulan dan kerjasama, Pembangunan Berkelanjutan juga harus dapat meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai masyarakat. Bagaimana membangun, memelihara serta mengembangkan norma dan perilaku secara terus-menerus yang akan dapat menjadikan pergaulan dan kerjasama membuahkan kehidupan yang bermutu adalah tantangan Pembangunan Berkelanjutan di daerah.

II.2. Pengembangan dan Pemeliharaan Ketersediaan Sumberdaya :

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia selama ini dikenal adanya kekayaan (aset) untuk pembangunan dan sumberdaya untuk pembangunan. Kekayaan adalah apa yang dimiliki dan sumberdaya adalah apabila kekayaan itu siap digunakan sebagai modal untuk menyelenggarakan pembangunan. Secara lebih persis dapat diartikan bahwa kekayaan adalah bahan yang belum siap, sedangkan sumberdaya adalah barang jadi yang siap digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, memiliki kekayaan tidak dengan sendirinya berarti dapat menyelenggarakan pembangunan. Kekayaan itu masih harus dikombinasikan dengan sumberdaya lain untuk mendapatkan manfaatnya. Dengan kata lain, memiliki kekayaan alam tidak dengan sendirinya dapat dimanfaatkan, apabila tidak disertai misalnya dengan modal dan teknologi.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan perkembangan memang harus tersedia sumberdaya yang mencukupi, bahkan sumberdaya itu harus dikembangkan, artinya harus mencapai kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Sumberdaya ini digolongkan dalam empat kategori, yaitu (1) sumberdaya alam yang secara alami tersedia, (2) sumberdaya buatan yang dibuat manusia (*humanmade resources*), (3) sumberdaya manusia yaitu manusia dengan segala kepandaian dan ketrampilan, dan (4) sumberdaya sosial sebagai produk dari keterkaitan, kerjasama dan interaksi antar manusia seperti misalnya sistem nilai dan kelembagaan. Akan tetapi, ada pula yang menyebutkan sumberdaya sosial adalah sumberdaya buatan yang bersifat lunak (*software*), meskipun demikian ada pula yang berpendapat bahwa sumberdaya sosial tidak dibuat tetapi terjadi dengan sendirinya sebagai hasil dari dialog dan interaksi.

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai pembangunan sumberdaya, mengubah kekayaan menjadi sumberdaya, menciptakan sumberdaya baru dan menata keterkaitan antar sumberdaya sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Kondisi ideal akan tercapai pada saat kualitas hidup yang terus meningkat, tanpa harus meningkatkan penggunaan sumberdaya alam mengingat sumberdaya ini – terutama yang tidak dapat diperbaharui – memiliki keterbatasan. Untuk itu sumberdaya lain yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya sosial dan sumberdaya buatan harus menjadi andalan Pembangunan Berkelanjutan, sedangkan sumberdaya alam harus dihemat dan dijaga kelestariannya.

II.3. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik :

Dalam kehidupan yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan merupakan upaya bersama dan terpadu antara pemerintah, badan usaha swasta dan masyarakat sipil. Meskipun demikian, komponen pemerintah yang merupakan komponen paling tertata, dalam kenyataannya seringkali tidak mempunyai kemampuan yang memadai. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena struktur yang sangat terpusat, kualitas serta kuantitas yang tidak mencukupi maupun sistem imbalan yang kurang sepadan.

Sedang komponen usaha swasta, akan berkembang dengan sendirinya apabila ada kesempatan. Meskipun demikian, hambatan struktural dan kultural sering membuat fungsi dan peran komponen ini tidak dapat dioptimalkan. Sedang masyarakat sipil kelihatannya sedang dalam taraf muncul dan berkembang. Faktanya di banyak negara berkembang, masyarakat sipil adalah komponen yang masih tertinggal diantara kedua komponen pokok yang lain.

Masyarakat sipil (*civil society*) yang di Indonesia disebut dengan masyarakat madani merupakan konsep tentang kedudukan masyarakat dalam negara dan tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat. Para ahli sosial politik, menganggap bahwa konsep ini merupakan rekonstruksi sejarah dan bukan suatu proses yang alamiah. Artinya, ini sangat bersifat kontekstual yakni sangat berkaitan dengan ruang (di mana terjadinya) dan waktu (kapan terjadinya).

Bagaimanapun proses dan riwayat pembentukannya, masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri, yang dalam batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri. Mandiri dalam arti mempunyai kemampuan untuk menuntut haknya sebagai warga negara, mengerti kewajiban dan tanggungjawabnya, dan mampu memutuskan apa yang terbaik bagi diri masyarakat tersebut. Hal ini tidak hanya mengenai segi politik seperti, menentukan siapa yang harus memerintah, bagaimana struktur pemerintahan yang harus dibangun, lembaga apa yang harus diadakan atau difungsikan, sistem dan prosedur penunjukkan wakil masyarakat, pelarangan atau perizinan dan sebagainya. Namun kemandirian ini juga berkaitan dengan perumusan masalah, penentuan prioritas kebutuhan, perencanaan pembangunan dan juga pengelolaan lingkungan.

Ada beberapa prasyarat yang minimal harus dipenuhi apabila kemandirian tersebut ingin dicapai. Prasyarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pertama : anggota masyarakat mampu merumuskan permasalahan, kebutuhan dan kepentingannya dan mampu mengartikulasikannya secara meyakinkan. Untuk itu memang diperlukan kecerdasan dan pengetahuan yang memadai. Paling tidak masyarakat mampu memilih wakilnya yang memahami dan mampu mengartikulasikan apa yang dirasakan, dipikirkan dan dikehendaki masyarakat.
- b. Kedua : masyarakat mampu menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengejar kepentingan bersama. Hal ini sering terhalang oleh kepentingan pribadi atau solidaritas yang dipaksakan. Bahkan kepentingan pribadi sering menimbulkan pertikaian yang demikian tajam yang mengakibatkan masyarakat madani lumpuh oleh dirinya sendiri.
- c. Ketiga : tersedianya kesempatan untuk mencerdaskan diri dari kesempatan menggalang solidaritas. Kekuatan pemerintah atau kekuatan kapitalis atau kolusi diantara keduanya sering menjadi penghalang bagi pencerdasan dan penggalangan solidaritas ini.

Dengan demikian kondisi ketiga menjadi prasyarat untuk dapat terjadinya kondisi pertama dan kedua, yang oleh beberapa kalangan dianggap

belum seperti yang diharapkan. Banyak program dan kegiatan yang ditujukan untuk penggalangan solidaritas, tetapi tanpa disertai dengan adanya pencerdasan, maka sudah dapat diduga bahwa apa yang terjadi adalah solidaritas semu.

Apabila masyarakat madani telah terwujud, dapat dikenali dan siap menjalankan peranannya, maka selanjutnya dikembangkan sifat-sifat penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti yang telah dipaparkan secara detail di atas, yaitu :

- a. partisipatif ;
- b. penegakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan ;
- c. transparansi ;
- d. mempunyai daya tanggap (responsiveness) yang memadai ;
- e. berorientasi pada konsensus ;
- f. bersikap adil ;
- g. efektif dan efisien ;
- h. akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas dan tegas ;
- i. memiliki visi strategis ; dan
- j. profesionalisme.

Atas dasar itu, dengan sifat-sifat penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, maka seluruh komponen pemerintahan selain mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan juga akan mempunyai daya saring untuk memilih secara tepat jalur pembangunan yang diinginkan. Apakah itu bersifat jalur keras, jalur lunak atau kombinasi di antara keduanya. Selain itu dengan sifat penyelenggaraan pemerintahan tersebut sesungguhnya juga terjadi upaya saling mengawasi antar komponen pemerintahan, meskipun dalam proses pembentukannya masih sangat diperlukan suatu pengawasan dari luar. Dalam hal yang demikian ini maka diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan baik di tingkat nasional maupun regional.

III. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Perumusan Strategi Pembangunan Daerah harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti :

- (1) Kondisi permasalahan yang dihadapi daerah dan kondisi permasalahan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
- (2) Potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka untuk merealisasikan visi daerah. Di era otonomi daerah, paradigma pembangunan mengalami perubahan yang cukup berarti, penekanan lebih difokuskan pada daerah sebagai pelaku pembangunan aktif “daerah membangun”, oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki daya dan upaya sendiri untuk dapat membangun daerahnya berdasarkan pada potensi daerah dalam rangka untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka optimalisasi segenap potensi daerah, pembangunan daerah harus dilakukan melalui pendekatan optimalisasi peran ketiga unsur pelaku pembangunan, yaitu: pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Unsur pemerintah terutama sekali terdiri dari institusi-institusi sektor publik. Sektor swasta mencakup perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil, baik formal maupun non-formal, yang bekerja melalui pasar. Sedangkan organisasi masyarakat sipil mencakup

kelompok-kelompok yang dibentuk secara sukarela oleh warga masyarakat. Kelompok ini termasuk serikat pekerja, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi lainnya. Dinamika pembangunan yang saling mengimbangi, saling mendukung, saling mengendalikan dan saling melengkapi akan ditentukan oleh intensitas dan kualitas interaksi di antara ketiganya.

Berdasarkan pada beberapa hal sebagaimana tersebut di atas maka strategi pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2006 – 2010 tidak dapat dilepaskan dari skenario pembangunan jangka panjang yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur. Dalam skenario pembangunan jangka panjang daerah dijelaskan bahwa ada lima lorong-lorong pilihan yang mencerminkan titik berat pembangunan selama 20 tahun ke depan. Skenario tersebut tidak terlepas dari *Grand Strategy* pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur yang dikenal dengan GERDABANGAGRI, yakni sebuah strategi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agri industri di Kalimantan Timur. Untuk mendukung *grand strategy* tersebut pada periode tahun 2005 – 2010, titik tekan pembangunan difokuskan pada penyiapan SDM dan pengembangan Infrastruktur. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk mengembangkan daerah, kualitas SDM dan tersedia infrastruktur yang memadai merupakan dasar bagi proses pembangunan di waktu yang akan datang.

III.1. Strategi Internal :

Strategi internal artinya adalah strategi yang berkaitan secara langsung dengan Pemerintah dan Masyarakat serta Pengusaha yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Adapun secara makro strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan difokuskan pada :

a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia :

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan prasarat yang harus dilakukan pada periode awal. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini mencakup kualitas sumberdaya di tingkat aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan kualitas sumberdaya manusia secara umum. Dipahami bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa harus didukung oleh aparatur pemerintah yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan untuk: (1) mewujudnya pelayanan prima; (2) mewujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat; (3) mewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Untuk mendukung peran serta masyarakat luas dalam pembangunan maka kualitas sumberdaya manusia di tingkat masyarakat juga harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik di tingkat aparatur pemerintah maupun di tingkat masyarakat dapat dilakukan melalui :

- (1) Peningkatan kemampuan aparatur yang memiliki integritas, profesional dan percaya diri sehingga dapat menciptakan *good governance* serta memberantas segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan desentralisasi otonomi daerah dan meningkatkan sistem dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

- (3) Penegakan hukum agar terwujud kepastian hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (5) Peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan peranannya baik di bidang regulasi, *services* ataupun *empowerment* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih seoptimal mungkin di era otonomi daerah.

b. *Pengembangan infrastruktur untuk merangsang pembangunan wilayah*

Infrastruktur merupakan penunjang utama dalam mencapai tujuan secara bertahap. Adapun infrastruktur yang dimaksud meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan, perhubungan dan telekomunikasi, serta irigasi. Pembangunan infrastruktur mencakup bina marga (jalan dan jembatan), sistem irigasi dan kebersihan. Infrastruktur tersebut merupakan fasilitas pertumbuhan wilayah yang merangsang bagi berkembangnya suatu kawasan.

c. *Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor agribisnis dan agroindustri :*

Peranan sektor agrobisnis dan agroindustri dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur dipandang cukup strategis. Disamping memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar, kabupaten Kutai Timur, juga mempunyai potensi pertanian dan perkebunan cukup besar yang masih belum dibudidayakan secara optimal.

Pengembangan sektor agrobisnis dan agroindustri secara makro diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dari sektor pertambangan yang sampai saat ini masih merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah ini. Secara mikro, pengembangan sektor ini, dapat memberikan manfaat internal yang besar yaitu : (1) kegiatan agribisnis menggunakan/berbasis sumberdaya yang dimiliki daerah, termasuk sumberdaya manusia dalam hal penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar; (2) kegiatan agri bisnis mencakup upaya difersifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah bagi petani dan penduduk pedesaan pada umumnya; (3) mengurangi tekanan terhadap lahan, karena merupakan perluasan dari usaha pertanian primer (*on-farm*), sehingga tekanan terhadap kelestarian lingkungan alam dan lingkungan dapat terjaga.

Hal yang dapat dilakukan adalah mengembangkan sektor-sektor agribisnis yang mampu mengaitkan secara terpadu dan terintegrasi dari bisnis hulu sampai hilir. Melalui strategi ini diharapkan pada waktu mendatang akan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja daerah.

d. *Pembangunan kolaborasi yang strategis :*

Melalui kolaborasi, daerah dapat berkonsentrasi dengan semua elemen terkait satu sama lainnya termasuk lembaga riset, masyarakat bisnis, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai institusi yang saling menopang. Daerah dapat membangun daya saing secara efektif melalui peningkatan produktivitas. Produktivitas ini menyangkut bagaimana memanfaatkan setiap sumberdaya secara bijaksana dan penciptaan nilai lebih bagi setiap produk.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan memberikan konsekuensi lebih lanjut berupa peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya

akan mampu mewujudkan kemandirian masyarakat membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Hal ini akan dapat mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agro industri di Kalimantan Timur.

III.2. Strategi Eksternal :

Strategi eksternal artinya adalah strategi yang tidak berkaitan secara langsung dengan Pemerintah dan Masyarakat serta Pengusaha yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Artinya strategi ini ditujukan kepada stakeholders di luar Kabupaten Kutai Timur seperti misalnya Pemerintah Daerah di sekitar Kutai Timur, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Nasional, pengusaha di luar Kabupaten Kutai Timur, LSM di luar Kabupaten kutai Timur, dan stakeholders kunci lainnya yang berada di luar Kabupaten Kutai Timur. Adapun secara makro, dalam garis besarnya, strategi eksternal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan kerjasama regional di kawasan Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agrobisnis dan agroindustri di kawasan Kalimantan Timur ;
- b. pengembangan pasar atas hasil produksi Kabupaten Kutai Timur untuk mensukseskan Program GERDABANGAGRI (Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis) ;
- c. pembentukan jaringan kerja untuk mengembangkan pariwisata daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayah atau zona sebagai berikut: *Sangatta, Sangkulirang dan Muara Wahau*, untuk lebih banyak mendatangkan wisatawan ;
- d. optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat ;
- e. peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal ;
- f. kerjasama pembangunan baik antar Pemda dan antar negara dengan masyarakat dan swasta maupun lembaga-lembaga donor ;
- g. peningkatan upaya menjalin kerjasama pemasaran dan ekspor impor dalam rangka memajukan daerah ; dan
- h. peningkatan efektivitas pengamanan laut, darat dan udara serta pengamanan pengembangan teknologinya.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

I. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah, maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah, dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur.

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2006–2010 yaitu memobilisasi sumber-sumber PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Melalui pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Kutai Timur secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar.

II. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan keterlaksanaan program-program strategis daerah.

III. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

III. 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur :

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah. Kebijakan pendapatan daerah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 22,07% per tahun. Pertumbuhan tersebut lebih disebabkan pada adanya pertumbuhan pada dana perimbangan yang merupakan komponen dominan dalam pendapatan daerah. Pertumbuhan dana perimbangan diperkirakan mencapai rata-rata 22,31% per tahun selama 2006-2010.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama komponen pendapatan yang lain yaitu PAD diperkirakan akan tumbuh 20,08% per tahun. Perkiraan laju pertumbuhan ini berdasarkan skenario ekonomi wilayah yang mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dengan memperhitungkan nilai tambah kegiatan pertambangan minyak gas dan batubara diperkirakan akan tumbuh rata-rata 10,52% per tahun selama 2006-2010. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi tanpa minyak bumi dan batubara diperkirakan akan tumbuh sebesar 18,33% per tahun.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan komponen Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak adalah unsur yang penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, dana perimbangan masih merupakan komponen dominan yang terutama bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Secara lengkap gambaran tentang prospek pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Proyeksi Keuangan Daerah – Aspek Pendapatan Kabupaten Kutai Timur 2006-2010
(Berdasarkan Skenario Pembangunan Jangka Menengah)

Pendapatan			2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan Asli Daerah		35.737.898.738	43.599.645.997	52.513.231.784	62.666.242.773	74.279.147.237
	1.1.	Pajak Daerah	9.395.708.135	11.462.608.688	13.806.043.905	16.475.331.449	19.528.433.751
	1.2.	Retribusi Daerah	5.961.504.972	7.272.937.569	8.759.829.297	10.453.471.834	12.390.641.901
	1.3.	Bagian Laba Usaha Daerah	11.728.219.348	14.308.233.831	17.233.433.492	20.565.379.245	24.376.422.861
	1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.652.466.284	10.555.865.909	12.713.925.091	15.172.060.246	17.983.648.724
2	Dana Perimbangan		826.872.395.358	1.006.595.462.866	1.229.446.505.086	1.506.341.215.892	1.850.379.089.936
	2.1.	Bagi Hasil Pajak	96.182.829.519	117.088.441.146	143.010.752.644	175.219.491.156	215.238.406.254
	2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam	521.376.440.174	634.699.092.715	775.215.675.121	949.808.973.233	1.166.738.747.477
	2.2.	Dana Alokasi Umum	167.271.681.227	203.628.657.014	248.710.181.932	304.724.440.068	374.321.386.248
	2.3.	Dana Alokasi Khusus	35.244.932.709	42.905.519.102	52.404.409.174	64.206.877.734	78.871.282.772
	2.4.	Bagi hasil Provinsi Kalimantan Timur	6.796.511.729	8.273.752.889	10.105.486.215	12.381.433.701	15.209.267.185
3	Bantuan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah		58.453.693.242	71.066.718.949	85.356.118.197	101.620.014.037	120.208.741.461
	3.1	Subsidi Provinsi Kaltim	36.737.755.564	44.664.957.930	53.645.749.863	63.867.499.709	75.550.390.669
	3.2	Bantuan Keuangan Pihak Ketiga	7.102.514.367	8.635.081.282	10.371.338.785	12.347.510.819	14.606.165.427
	3.2	Subsidi pemerintah pusat	14.613.423.310	17.766.679.737	21.339.029.549	25.405.003.509	30.052.185.365
Total Pendapatan			921.063.987.337	1.121.261.827.812	1.367.315.855.067	1.670.627.472.703	2.044.866.978.633

Sumber: Hasil Analisis

Tabel
Proyeksi Struktur Keuangan Daerah – Aspek Pendapatan Kabupaten Kutai Timur 2006-2010
(Berdasarkan Skenario Pembangunan Jangka Menengah)

Pendapatan			2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan Asli Daerah		3,88	3,89	3,84	3,75	3,63
	1.1.	Pajak Daerah	1,02	1,02	1,01	0,99	0,95
	1.2.	Retribusi Daerah	0,65	0,65	0,64	0,63	0,61
	1.3.	Bagian Laba Usaha Daerah	1,27	1,28	1,26	1,23	1,19
	1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	0,94	0,94	0,93	0,91	0,88
2	Dana Perimbangan		89,77	89,77	89,92	90,17	90,49
	2.1.	Bagi Hasil Pajak	10,44	10,44	10,46	10,49	10,53
	2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam	56,61	56,61	56,70	56,85	57,06
	2.2.	Dana Alokasi Umum	18,16	18,16	18,19	18,24	18,31
	2.3.	Dana Alokasi Khusus	3,83	3,83	3,83	3,84	3,86
	2.4.	Bagi hasil Provinsi Kalimantan Timur	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
3	Bantuan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah		6,35	6,34	6,24	6,08	5,88
	3.1	Subsidi Provinsi Kaltim	3,99	3,98	3,92	3,82	3,69
	3.2	Bantuan Keuangan Pihak Ketiga	0,77	0,77	0,76	0,74	0,71
	3.2	Subsidi pemerintah pusat	1,59	1,58	1,56	1,52	1,47
	Total Pendapatan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan antara lain adalah :

1. Perkembangan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan diperkirakan akan terus meningkat. Sumber utama dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sumberdaya alam. Besarnya bagi hasil pajak dan bukan pajak sumberdaya alam ini masing-masing akan memberikan kontribusi sebesar 11,63% dan 63,05 terhadap penerimaan dana perimbangan serta 10,53% dan 57,06% terhadap pendapatan daerah pada tahun 2010.
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan penerimaan lain-lain, selama kurun waktu tahun 2006–2010 diperkirakan tetap mengalami **peningkatan**. Peningkatan penerimaan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan bagian laba usaha daerah yang merupakan 32,81% dari total penerimaan PAD pada tahun 2010.
3. Upaya ekstensifikasi pajak tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana dan prasarana Kabupaten saat ini. Untuk itu, kedepan nanti prioritas pembangunan Kabupaten harus benar-benar terfokuskan pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan upaya ekonomi lokal Kabupaten, yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

III. 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur :

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah sampai dengan tahun 2010, atau dengan kata lain, bahwa perkembangan ekonomi harus berkorelasi positif dengan pendapatan daerah.

Perkembangan kondisi perekonomian dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB. PDRB Kabupaten Kutai Timur sangat didominasi oleh nilai tambah yang dihasilkan sektor pertambangan dan penggalian yaitu 84,47% pada tahun 2004.

Dengan demikian angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur sangat ditentukan oleh sektor pertambangan. Dari hasil proyeksi berdasarkan skenario pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2010 meningkat rata-rata 10,52% per tahun dengan pertambangan migas dan batubara dan 18,33% per tahun tanpa pertambangan migas dan batubara.

Selengkapnya gambaran tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan skenario pembangunan jangka panjang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Perkembangan Dan Proyeksi PDRB Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Berdasarkan Skenario Pembangunan Jangka Menengah)

	Realisasi					Proyeksi Berdasarkan Skenario				
Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	287.474,21	293.966,44	514.811,64	478.621,88	496.269,59	683.850,40	810.990,65	968.298,47	1.162.699,83	1.404.075,09
2. Pertambangan Dan Penggalian	4.735.701,68	5.582.319,56	6.310.319,93	6.144.912,93	7.788.148,45	9.190.066,93	9.985.428,90	10.851.451,79	11.794.661,92	12.822.235,07
Sektor Primer	5.023.175,89	5.876.286,00	6.825.131,57	6.623.534,81	8.284.418,04	9.873.917,33	10.796.419,55	11.819.750,26	12.957.361,75	14.226.310,17
3. Industri Pengolahan	20.008,60	20.561,18	34.327,47	37.394,79	41.872,08	55.407,83	65.869,67	79.621,48	97.466,67	120.059,58
4. Listrik, Gas Dan Air Bersih	3.942,44	4.569,86	5.915,01	7.337,17	8.322,85	10.855,53	12.481,62	14.415,67	16.723,80	19.487,86
5. Bangunan	35.941,79	150.529,46	278.286,33	225.826,72	220.780,31	300.323,67	355.546,77	426.257,42	517.424,77	635.852,24
Sektor Sekunder	59.892,83	175.660,50	318.528,81	270.558,68	270.975,24	366.587,02	433.898,06	520.294,57	631.615,24	775.399,68
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	203.845,40	235.975,71	298.778,36	296.129,56	349.368,18	499.630,74	601.184,36	726.337,19	881.114,81	1.071.139,88
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	101.197,56	125.447,94	127.889,05	129.035,79	133.917,15	150.546,91	160.950,87	173.136,67	187.269,67	203.684,86
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	69.657,75	78.803,64	86.875,70	91.880,10	96.639,47	110.761,46	120.311,17	132.142,05	147.018,65	165.844,06
9. Jasa-Jasa	35.813,97	40.047,55	70.668,09	83.616,78	85.053,97	88.868,77	91.339,50	94.265,95	97.727,38	101.203,55
Sektor Tersier	410.514,68	480.274,84	584.211,20	600.662,23	664.978,77	849.807,88	973.785,90	1.125.881,86	1.313.130,50	1.541.872,35
PDRB Dengan Migas dan Batubara	5.493.583,40	6.532.221,34	7.727.871,59	7.494.755,71	9.220.372,06	11.090.312,22	12.204.103,51	13.465.926,69	14.902.107,50	16.543.582,19
PDRB Tanpa Migas	5.247.975,61	6.292.932,97	7.482.046,64	7.246.423,37	8.959.067,49	10.806.839,88	11.908.654,79	13.157.883,66	14.580.816,56	16.208.351,86
PDRB Tanpa migas dan batubara	794.721,68	990.412,18	1.470.085,96	1.413.295,97	1.507.409,45	2.005.995,74	2.344.204,00	2.763.571,78	3.284.640,56	3.932.061,36

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Hasil Analisis

Tabel
Realisasi Dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Atas Harga Konstan)
(Berdasarkan Skenario Pembangunan Jangka Menengah)

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi			
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1. Pertanian	2,26	75,13	-7,03	3,69	18,59	19,40	20,08	20,76
2. Pertambangan Dan Penggalian	17,88	13,04	-2,62	26,74	8,65	8,67	8,69	8,71
Sektor Primer	16,98	16,15	-2,95	25,08	9,34	9,48	9,62	9,79
3. Industri Pengolahan	2,76	66,95	8,94	11,97	18,88	20,88	22,41	23,18
4. Listrik, Gas Dan Air Bersih	15,91	29,44	24,04	13,43	14,98	15,50	16,01	16,53
5. Bangunan	318,81	84,87	-18,85	-2,23	18,39	19,89	21,39	22,89
Sektor Sekunder	193,29	81,33	-15,06	0,15	18,36	19,91	21,40	22,76
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	15,76	26,61	-0,89	17,98	20,33	20,82	21,31	21,57
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	23,96	1,95	0,90	3,78	6,91	7,57	8,16	8,77
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13,13	10,24	5,76	5,18	8,62	9,83	11,26	12,80
9. Jasa-Jasa	11,82	76,46	18,32	1,72	2,78	3,20	3,67	3,56
Sektor Tersier	16,99	21,64	2,82	10,71	14,59	15,62	16,63	17,42
PDRB Dengan Migas dan Batubara	18,91	18,30	-3,02	23,02	10,04	10,34	10,67	11,02
PDRB Tanpa Migas	19,91	18,90	-3,15	23,63	10,20	10,49	10,81	11,16
PDRB Tanpa migas dan batubara	24,62	48,43	-3,86	6,66	16,86	17,89	18,85	19,71

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Hasil Analisis

Tabel
Realisasi dan Proyeksi Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Atas Harga Konstan 2000
(Berdasarkan Skenario Pembangunan Jangka Menengah)

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi				
	2000	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	5,23	4,50	6,66	6,39	5,38	6,17	6,65	7,19	7,80	8,49
2. Pertambangan Dan Penggalian	86,20	85,46	81,66	81,99	84,47	82,87	81,82	80,58	79,15	77,51
Sektor Primer	91,44	89,96	88,32	88,38	89,85	89,03	88,47	87,78	86,95	85,99
3. Industri Pengolahan	0,36	0,31	0,44	0,50	0,45	0,50	0,54	0,59	0,65	0,73
4. Listrik, Gas Dan Air Bersih	0,07	0,07	0,08	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
5. Bangunan	0,65	2,30	3,60	3,01	2,39	2,71	2,91	3,17	3,47	3,84
Sektor Sekunder	1,09	2,69	4,12	3,61	2,94	3,31	3,56	3,86	4,24	4,69
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	3,71	3,61	3,87	3,95	3,79	4,51	4,93	5,39	5,91	6,47
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	1,84	1,92	1,65	1,72	1,45	1,36	1,32	1,29	1,26	1,23
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,27	1,21	1,12	1,23	1,05	1,00	0,99	0,98	0,99	1,00
9. Jasa-Jasa	0,65	0,61	0,91	1,12	0,92	0,80	0,75	0,70	0,66	0,61
Sektor Tersier	7,47	7,35	7,56	8,01	7,21	7,66	7,98	8,36	8,81	9,32
PDRB Dengan Migas dan Batubara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas	95,53	96,34	96,82	96,69	97,17	97,44	97,58	97,71	97,84	97,97
PDRB Tanpa migas dan batubara	14,47	15,16	19,02	18,86	16,35	18,09	19,21	20,52	22,04	23,77

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Hasil Analisis

III.3. Belanja Daerah :

Dalam rangka mengatur penggunaan belanja daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perlu disusun skala prioritas melalui penetapan kebijakan umum belanja daerah. Skala prioritas tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada Dokumen RPJMD, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, aspirasi atau tuntutan masyarakat, yang diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006-2010 dilaksanakan dengan arah dan kebijakan umum sebagai berikut :

(1) Peningkatan bidang Sumberdaya Manusia (SDM) :

Salah satu cara untuk meningkatkan bidang sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan guna memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan serta pengurangan angka buta huruf dan siswa putus sekolah.

(2) Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :

Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan pengembangan UKM dan IRT melalui peningkatan manajemen dan SDM UKM serta dukungan bahan baku dan modal. Selain itu dilakukan pengembangan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan berbasis pada sumberdaya lokal. Hal itu juga didukung dengan promosi yang gencar, baik melalui media cetak dan elektronik.

(3) Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup :

Salah satu cara untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup adalah perumusan dan penetapan kebijakan penggunaan tata ruang wilayah yang bertujuan mewujudkan tertatnya pembangunan kawasan yang berorientasi pada peruntukan lahan untuk sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri, perdagangan, dan pariwisata

(4) Peningkatan bidang infrastruktur :

Jalur transportasi memegang peranan penting bagi kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Kutai Timur, baik manusia maupun barang. Untuk itu perlu dibangun jalur transportasi (pembangunan jalan dan pemeliharaan) yang memadai. Selain itu perlu ditingkatkan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur pertanian.

Tabel
Keuangan Daerah-Aspek Belanja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006

No.	Uraian	Jumlah
II	Belanja	
1	Aparatur Pemerintah	403.055.704.240
1.1.	Belanja Administrasi Umum	253.906.530.290
	Belanja Pegawai/Personalia	177.309.985.100
	Belanja Barang/Jasa	53.858.397.590
	Belanja Perjalanan Dinas	22.738.147.600
1.2.	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	137.838.801.100
	Belanja Pegawai/Personalia	136.096.301.100
	Belanja Barang/Jasa	705.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas	642.500.000
	Belanja Pemeliharaan	395.000.000
1.3.	Belanja Modal	11.310.372.850
2	Pelayanan Publik	759.572.000.000

2.1.	Belanja Administrasi Umum	60.295.631.000
2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	214.222.278.002
2.3.	Belanja Modal	485.054.090.998
	Pembangunan Jalan dalam Lingkup Ibukota Kabupaten	
	Pembangunan Jalan Penghubung ke Kecamatan dan Desa	
	Pembangunan Jembatan-jembatan	
	Penyelesaian Pembangunan 11 Kantor Dinas	
	Pembangunan Komplek Olahraga dan Stadion	
	Pembangunan Gedung pemuda	
	Pembangunan Jaringan Infrastruktur Kawasan Bukit Pelangi :	
	*Listrik dan Drainase	
	Pembangunan dan Penyempurnaan Landscape Instansi Vertikal	
	Pembangunan Rumah Sakit Umum	
	Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER)	
	Pengadaan Alat Unit Pemeliharaan Rutin (UPR)	
	Pengadaan Penerangan Jalan (LPJU)	
	Pembangunan Masjid Agung	
	Pembangunan Pasar Induk	
	Perbaikan Lingkungan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan	
	Pembangunan Infrastruktur 7 Kecamatan Pemekaran :	
	*Kantor Camat	
	*Puskesmas	
	Pembangunan Workshop dan Laboratorium Konstruksi	
	Pembangunan Terminal Regional Sangatta	
	Pembangunan Fasilitas Uji Keur Kendaraan	
	Pembangunan Sarana Air Bersih Ibukota Kabupaten dan Kecamatan	
	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	
	Belanja Modal	
	Infrastruktur Perumahan PNS	
	Pembangunan Jaringan Irigasi	
	Pengadaan Genset dan Jaringan Listrik Kecamatan dan Pedesaan	

Lanjutan Tabel 6.6

No.	Uraian	Jumlah
	Pengadaan Obat dan Farmasi	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	Pengadaan Peralatan Industri Kecil	
	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
	Pengadaan dan Pendistribusian Bibit Sawit	
	Pengadaan Alsintan	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	Pembibitan Utama Kelapa Sawit (Main Nursery)	
	Pengadaan Bibit Komoditas Perkebunan Non Sawit	
	Dan Lain-lain	
3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	31.117.000.000
3.1.	Alokasi Dana Desa	13.500.000.000

3.2.	Bansos Keagamaan	7.947.000.000
3.3.	Bansos Kemasyarakatan	2.500.000.000
3.4.	Banos Lainnya	3.170.000.000
3.5.	Bantuan untuk KONI Kutim dalam Rangka PORDA	4.000.000.000
4	Belanja Tidak Tersangka	3.000.000.000
	JUMLAH	1.196.744.704.240

Sumber: Dispenda Kab. Kutai Timur

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Kebijakan merupakan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk lebih memudahkan pemahaman, maka arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut :

I. BIDANG PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA

I. 1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas

A. Kebijakan :

1. Mengendalikan angka kelahiran dan memperkecil angka kematian, dengan meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan hak-hak reproduksi.
2. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif.
3. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja pada kesehatan reproduksi.
4. Meningkatkan kemandirian pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi serta pemberdayaan keluarga.
5. Mengembangkan sistem informasi kependudukan.

B. Program Strategis :

1. Pelayanan Keluarga Berencana.
2. Pemberdayaan Keluarga.
3. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja.
4. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana.
5. Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan.

I. 2. Peningkatan Kualitas Hidup Beragama :

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamatan agama bagi para pemeluknya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Menjamin kebebasan dan kesempatan pelaksanaan ajaran agama bagi pemeluk-pemeluknya.
4. Meningkatkan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
6. Memantapkan pengalaman agama sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

7. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis penuh toleransi dan saling menghormati.

B. Program Strategis :

1. Peningkatan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.
2. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan pembangunan tempat-tempat ibadah seperti pembangunan Mesjid Agung/*Islamic Centre* dan *Christian Centre* serta pelayanan haji.
3. Regulasi yang mengatur kewajiban menyediakan tempat ibadah pada setiap fasilitas publik yang buka pada rentang waktu pelaksanaan ibadah.
4. Pembinaan dan pengembangan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
5. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas guru agama pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta pembinaan dan pengembangan Da'i Pembangunan.
6. Penerangan agama bagi aparaturnya pemerintah daerah.
7. Peningkatan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

I. 3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Berkualitas :

A. Kebijakan :

1. Menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% setiap tahun sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Menuntaskan dan mengembangkan Program Wajib Belajar 9 tahun serta pemerataan pendidikan dengan membebaskan biaya pendidikan dengan pemberian bantuan terhadap Biaya Operasional Sekolah (BOS)/RAPBS untuk tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas negeri serta perguruan tinggi (STIPER).
3. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan secara signifikan agar dapat bekerja secara profesional.
4. Membina dan mengembangkan pendidikan menengah umum dan kejuruan (SMU, Madrasah Aliyah, SMK), SMK Kelautan, Politeknik.
5. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran agar anak didik dapat menguasai dan memahami IPTEK.
6. Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta, madrasah, pesantren dan pendidikan luar sekolah.
7. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan dosen serta staf lainnya melalui beasiswa pendidikan kejenjang lebih tinggi (S1/S2/S3).
8. Peningkatan mutu dan pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan non formal.
9. Pemutakhiran database pendidikan Kutai Timur berbasis internet.
10. Menjalin kemitraan dengan organisasi pendidikan seperti dewan pendidikan, LSM pendidikan, ISPI, PGRI, dll.

11. Mengembangkan STIPER sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agrobisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
12. Menempatkan riset sebagai bagian dari dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
13. Mengembangkan pendidikan budi pekerti di lembaga pendidikan agar output yang dihasilkan selain cerdas juga berakhlak mulia.
14. Memberikan reward atau penghargaan yang bermakna kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan yang bertugas di pedalaman/wilayah terpencil.
15. Memberikan beasiswa khusus kepada murid/siswa berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh daerah.
16. Menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga pendidikan di luar Kutim dalam rangka percepatan perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju.
17. Mengupayakan diadakannya PERDA tentang pendidikan di Kutai Timur sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
18. Bermitra dengan perusahaan/industri di Kutai Timur untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing sesuai kebutuhan daerah.
19. Menetapkan standar kompetensi guru dan sekolah.
20. Membina dan mengembangkan/pemberdayaan perempuan.
21. Membina dan mengembangkan pendidikan non formal.
22. Membina dan mengembangkan minat baca masyarakat melalui pendirian perpustakaan desa, kecamatan dan kabupaten.

B. Program Strategis :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan gedung baru dan rehabilitasi, mebel, laboratorium, perpustakaan, dan alat peraga pendidikan pada berbagai jenjang.
2. Pembiayaan/biasiswa peserta didik yang berprestasi pada jenis pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
3. Penetapan jenis pendidikan yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dan ketersediaan tenaga kerja.
4. Pengembangan institusi pendidikan dengan pemenuhan standar ketenagaan, pelatihan manajemen pendidikan, dan subsidi sekolah perguruan tinggi.
5. Pengembangan Politeknik, Balai Latihan Kerja Mandiri sebagai alternatif pendidikan non formal terapan siap kerja.
6. Pengembangan sekolah-sekolah unggulan di beberapa kota pusat pertumbuhan seperti Sangatta, Kombeng, Muara Ancalong, dan Sangkulirang.
7. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis.
8. Pembinaan terhadap Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite-komite Sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9. Pengembangan reformasi pendidikan melalui pelaksanaan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat, pelatihan dan studi lanjut tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyusunan juklak manajemen pendidikan dasar, perluasan jangkauan dan daya tampung pendidikan dasar peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan akreditasi sekolah, penyusunan juklak penilaian hasil belajar dan pemberdayaan pengawas sekolah.
10. Pembiayaan/beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin.
11. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan, dengan pelatihan dan pendidikan lanjutan yang sejalan dengan bidang tugasnya.
12. Pengembangan minat baca dan pemasyarakatan jam belajar masyarakat.
13. Pembinaan Seni dan Budaya.

I. 4. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Berkualitas

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan promosi cara hidup sehat, sesuai Program Indonesia Sehat tahun 2008.
2. Meningkatkan penanganan kasus-kasus penyakit menular dan wabah dengan mendorong Partisipasi swasta dan masyarakat.
3. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan pembangunan RSUD yang representatif, serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
4. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.

B. Program Strategis :

1. Promosi cara hidup sehat, pengembangan imunisasi, penyuluhan gizi, dan pembinaan kesehatan lingkungan.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
3. Peningkatan cakupan manajemen, dan mutu rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya.
4. Pengembangan pelayanan obat-obatan dan makanan yang memenuhi standar kesehatan serta sertifikasi kehalalan.
5. Pengangkatan, pelatihan dan pendidikan lanjutan tenaga kesehatan.
6. Sosialisasi asuransi kesehatan JPKM.
7. Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan sistem JPKM.

I. 5. Pembangunan Pemuda dan Olah Raga secara Berkualitas :

A. Kebijakan :

1. Membina dan mengembangkan minat generasi muda.
2. Membina dan mengembangkan olah raga serta melengkapi sarana dan prasarana dan olah raga.

B. Program Strategis :

1. Pembinaan generasi muda yang mengarah kepada pengembangan dinamika kepemudaan dan kepemimpinan dalam rangka mempersiapkan kader bangsa pelopor pembangunan dan penerus estafet kepemimpinan.
2. Pemasyarakatan dan pembinaan prestasi olah raga.

II. BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

II. 1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial :

A. Kebijakan :

1. Membangun kesehatan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat rawan bencana dan penyantunan terhadap korban akibat bencana.
3. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, kelompok rentan sosial serta lanjut usia.
4. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja yang memadai, dengan melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

B. Program Strategis :

1. Pengembangan potensi kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial.
3. Pengembangan kelembagaan sosial baik pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

II. 2. Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal

A. Kebijakan :

1. Membina dan mengembangkan seni dan budaya serta melengkapi sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian.
2. Mengintegrasikan kebudayaan lokal/masyarakat kedalam program pendidikan baik formal maupun non formal.

B. Program Strategis :

1. Pembinaan, pemantapan dan pengembangan Seni dan Budaya.
2. Pengembangan kelembagaan kebudayaan..
3. Pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala termasuk kawasan cagar budaya, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

II. 3. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

A. Kebijakan :

1. Membuka peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Meningkatkan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan bursa tenaga kerja yang diminatinya dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerjanya secara sistematis.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak pekerja dan keluarganya melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dengan melibatkan organisasi pekerja.
4. Mengembangkan hubungan industrial tenaga kerja sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja.
5. Melakukan regulasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
6. Membuka, mengembangkan, dan memberdayakan kawasan transmigrasi.

B. Program Strategis:

1. Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan informasi ketenagakerjaan.
2. Pelatihan calon tenaga kerja dan tenaga kerja melalui pendidikan pada Balai Latihan Kerja Mandiri, Politeknik dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengupahan, program jaminan sosial tenaga kerja, dan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan lainnya.
4. Pengembangan dan pelatihan tentang sistem hubungan industrial untuk pengusaha dan serikat pekerja.
5. Penyusunan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.
6. Pembukaan, pengembangan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi.

III. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

III. 1. Revitalisasi Pertanian Wilayah :

1) Tanaman Pangan dan Hortikultura

A. Kebijakan :

1. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kutai Timur yang berbasis pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan perwilayahan komoditas pertanian.
2. Mengembangkan kegiatan agribisnis tanaman hortikultura yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan petani dan mempunyai pasar yang jelas dan prospektif.
3. Mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi dan sistem agribisnis kepada masyarakat pengguna melalui media diseminasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga tani.

B. Program Strategis:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan.
2. Pengembangan komoditas unggulan.
3. Pengembangan agribisnis hulu dan hilir.
4. Pengembangan program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian (Prima Tani).

2) Bidang Perikanan dan Kelautan

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur, pembudidayaan ikan, nelayan dan masyarakat pesisir.
2. Penerapan teknologi unggulan yang prospektif dan ekonomis.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.
4. Membangun dan mengembangkan usaha perikanan yang ramah lingkungan.
5. Menciptakan sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahaan.
6. Menciptakan sistem ketatalaksanaan dari sistem informasi yang efisien dan efektif.
7. Mendorong pengembangan produk yang bernilai ekspor dan pemenuhan konsumsi dalam negeri.
8. Mendorong pengembangan kawasan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pengembangan usaha bahari.

B. Program Strategis:

1. Pengembangan pusat pelatihan perikanan dan kelautan.
2. Peningkatan produksi perikanan.
3. Pengembangan kegiatan agribisnis perikanan.
4. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

3) Bidang Peternakan

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan ketersediaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur di Kutai Timur dan sekitarnya.
2. Meningkatkan peranan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

B. Program Strategis:

1. Pengembangan produksi peternakan.
2. Pengembangan pencapaian swasembada daging.
3. Penataan distribusi hasil peternakan.
4. Pemberdayaan petani dan peternak
5. Pengembangan agribisnis peternakan.

4) Bidang Perkebunan

A. Kebijakan :

1. Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berorientasi ekspor.
2. Menganangkan pengembangan kelapa sawit sejuta hektar dengan pola kemitraan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar swasta serta pola swadaya berbantuan.
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia petani dan tenaga kerja perkebunan dalam rangka penerapan teknologi dan pengembangan kualitas SDM aparatur dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan.
4. Memanfaatkan kelembagaan dalam rangka kemandirian usaha petani.
5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan dan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
6. Mengembangkan teknologi terapan melalui pengkajian-pengkajian lokal spesifik.
7. Mengembangkan wilayah-wilayah sentra produk dengan pendekatan Kawasan industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).
8. Meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi di bidang perkebunan besar.
9. Menumbuhkembangkan industri yang berbasis hasil perkebunan.
10. Menumbuhkembangkan peluang pasar komoditi perkebunan yang kompetitif.

B. Program Strategis:

1. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan.
2. Peningkatan produksi dan pengolahan hasil perkebunan.
3. Pengembangan PIR – Swadaya.
4. Pelatihan dan pendidikan petani, tenaga kerja perkebunan dan aparatur perkebunan.
5. Pengembangan agroindustri perkebunan.

5) Bidang Kehutanan

A. Kebijakan :

1. Memberantas penebangan liar dan perambahan hutan.
2. Merehabilitasi hutan dan lahan.
3. Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
4. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan.
5. Mengendalikan kekayaan keaneka ragaman hayati terutama pada kawasan konservasi dan hutan lindung.

B. Program Strategis :

1. Perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya hutan.

3. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Penyuluhan masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kehidupan manusia.
5. Pengendalian kekayaan keanekaragaman hayati pada kawasan konservasi Taman Nasional Kutai dan hutan lindung Bontang.
6. Mengendalikan kawasan mangrove di sepanjang pantai.

III. 2. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

A. Kebijakan :

Memperbesar kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan prioritas kepada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Program Strategis :

Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penciptaan iklim usaha bagi UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, pemberdayaan usaha skala mikro dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

III. 3. Peningkatan Daya Saling Simpul Agribisnis/Agroindustri

A. Kebijakan :

1. Peningkatan daya saing agribisnis yang berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah.
2. Percepatan terbentuknya sub-sistem agroindustri yang dititik-beratkan pada pengembangan industri-industri yang berdaya saing tinggi, produk berkualitas dan harga mampu bersaing di pasar regional, domestik dan internasional.
3. Pemberian iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan agribisnis dan agroindustri secara terpadu.

B. Program Strategis :

1. Pengembangan sumberdaya manusia meliputi pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER), Pusat Pelatihan Agribisnis dan Poli-Agro, dan Pelatihan Sarjana Penggerak Agribisnis.
2. Percepatan pembangunan sistem sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan.
3. Pengembangan sistem informasi dan promosi usaha.

III.4. Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan BUMD

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan/mengoptimalkan kinerja dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap keuangan daerah.
2. Pemanfaatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Pengaturan ruang lingkup pekerjaan dan kewenangan serta struktur kelembagaan.

B. Program Strategis :

1. Peningkatan pengelolaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peningkatan manajemen usaha.
3. Penataan struktur kelembagaan dan personalia.
4. Peningkatan sumberdaya manusia pengelola.
5. Pengembangan bisnis (*business development*)

III. 5. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas

A. Kebijakan :

1. Peningkatan investasi dan ekspor non migas dan peningkatan daya saing dan revitalisasi pertanian dalam arti luas.
2. Pemberian insentif regulasi untuk kemudahan berinvestasi.
3. Perwujudan jaminan keamanan dan stabilitas usaha.
4. Peningkatan kerja sama perdagangan dalam rangka pengembangan investasi dan ekspor produk daerah.

B. Program Strategis :

1. Pengembangan sumberdaya lokal secara optimal dan berdaya saing.
2. Peningkatan deregulasi dan debirokrasi perijinan melalui peningkatan pengelolaan perijinan usaha secara terpadu (*one roof services*).
3. Peningkatan kerjasama perdagangan antara pemerintah daerah dengan negara lain.
4. Peningkatan kerjasama keamanan terintegrasi dengan unsur pendukung keamanan.

III. 6. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

A. Kebijakan :

1. Melaksanakan spesialisasi produksi berdasarkan potensi sumberdaya lokal pada setiap kecamatan.
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif dari produk-produk yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi.
3. Meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan ketrampilan dan pelatihan.
4. Peningkatan penerimaan daerah.
5. Penciptaan iklim usaha yang kondusif.

B. Program Strategis :

1. Peningkatan produksi melalui peningkatan pelayanan saprodi yang lebih baik.
2. Penyesuaian aturan main antara investor dengan pemerintah daerah melalui perda baru.

3. Pendataan potensi PAD serta pengembangan manajemen asset dan properti daerah.
4. Pengembangan dan pembaharuan data base potensi sosial-ekonomi daerah.
5. Pengembangan perencanaan bisnis (*business plan*).

III. 7. Penanggulangan Kemiskinan

A. Kebijakan :

1. Pengurangan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat.
2. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi minimal 6,6 % per tahun yang diimbangi dengan kebijakan pemerataan dan pemihakan kepada kelompok miskin dan paling rawan terhadap proses pembangunan dengan prioritas pada pengurangan kemiskinan.

B. Program Strategis :

1. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan untuk memenuhi hak-hak dasar seperti : hak atas pangan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas layanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, hak atas tanah, hak atas SDA dan lingkungan hidup, hak atas rasa aman dan hak untuk berpartisipasi.
2. Pengembangan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar seperti percepatan pembangunan pedesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

IV. BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1. Pembangunan Perdesaan :

A. Kebijakan :

1. Mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat perdesaan melalui pengembangan agribisnis dengan menitikberatkan pada pengembangan organisasi bisnis khususnya petani dan nelayan termasuk jaringan kerja produksi dan jaminan pemasaran yang terlembaga dan dikuasai kelompok masyarakat dengan dukungan pelaku ekonomi lainnya secara kemitraan.
2. Meningkatkan investasi dalam sumberdaya manusia yang dapat mendorong produktifitas, kewiraswastaan dan ketahanan sosial masyarakat perdesaan untuk mengembangkan kehidupan ekonomi-sosial masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan, prasarana-prasarana perdesaan untuk mendukung proses produksi, pengolahan dan pemasaran serta pelayanan sosial masyarakat, khususnya bagi wilayah yang terletak di pedalaman.

4. Meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pemanfaatan dan peningkatan maupun pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan organisasi pemerintah dan lembaga masyarakat perdesaan untuk dapat mendukung pengembangan agribisnis di perdesaan, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pelayanan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat.

B. Program Strategis :

1. Peningkatan pembangunan komunitas (*community development*).
2. Penyediaan fasilitas pelayanan (sosial-kemasyarakatan-per-ekonomian) termasuk prasarana dasar.
3. Pengembangan lembaga desa dengan meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa serta lembaga sosial kemasyarakatan tingkat desa.
4. Pengembangan sistem informasi perdesaan dan pembentukan forum komunikasi pembangunan perdesaan.

IV. 2. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

A. Kebijakan :

1. Membangun kapasitas lembaga sosial ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah, masyarakat sendiri maupun sektor swasta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maupun memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang layak dengan melibatkan sektor swasta.
3. Memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi makro, pengembangan sektor ekonomi riil, dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin.
4. Mengembangkan lembaga keswadayaan masyarakat untuk membangun solidaritas sosial dan ketahanan sosial masyarakat.
5. Menciptakan iklim politik yang dapat membuka kesempatan yang luas pada masyarakat untuk melakukan proses interaksi dengan dunia politik, penyaluran pendapat dan berorganisasi secara bertanggung jawab.

B. Program Strategis :

1. Membangun kapasitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya maupun memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

2. Pengembangan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat yang dapat mengelola kegiatan usaha secara kompetitif dan menguntungkan dengan melibatkan sektor swasta.
3. Pengembangan dan penguatan lembaga keswadayaan masyarakat sebagai sarana membangun solidaritas sosial masyarakat dan ketahanan sosial masyarakat.

IV. 3. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

A. Kebijakan :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendorong pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan IPTEK tepat guna yang dapat meningkatkan produktifitas serta meningkatkan kerjasama yang baik dan serasi antar instansi terkait.
2. Penerapatan teknik produksi dan teknologi untuk mendorong penggunaan teknik produksi terutama teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktifitas pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.
3. Pengembangan penelitian untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan kerjasama yang baik dan serasi antar industri terkait baik pemerintah maupun swasta dalam kegiatan penelitian.
4. Mengembangkan Sisten Informasi yang berbasis teknologi mutakhir sesuai kebutuhan daerah.

B. Program Strategis :

1. Penelitian dan Pengembangan.
2. Diseminasi Informasi Teknologi.
3. Penguatan Institusi IPTEK.
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
5. Pengembangan Televisi dan Radio Daerah.
6. Pengembangan Website Daerah.

IV. 4. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan dan Kebijakan Perlindungan Anak

A. Kebijakan :

1. Memberdayakan institusi pemerintah dan organisasi-organisasi yang memiliki visi pemberdayaan perempuan maupun perguruan tinggi agar lebih berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan.
2. Mensosialisasikan dan menerapkan segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak untuk mengantisipasi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak serta berkembangnya anak-anak jalanan/terlantar.

B. Program Strategis :

1. Mensosialisasikan gagasan peranan perempuan dalam keluarga.
2. Memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

3. Meningkatkan status pendidikan perempuan di daerah pedesaan dengan meningkatkan jumlah lembaga pendidikan baik formal, informal maupun non formal.
4. Memberi kesempatan luas bagi perempuan tanpa membedakan jenis kelamin untuk terlibat dalam segala bidang kehidupan termasuk perekrutan pegawai.
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di rumah tangga maupun institusi lain yang lebih luas.
6. Perlindungan anak dan remaja.

V. BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

V. 1. Prasarana Sumberdaya Air

A. Kebijakan :

1. Membangun dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan tampak.
2. Membangun dan mengelola pengendalian banjir serta pengamanan pantai.

B. Program Strategis :

1. Pembangunan peningkatan, rehabilitas, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan tambak.
2. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan pengairan se Kutai Timur.
3. Pengendalian banjir, pengelolaan dan konservasi sumberdaya air.

V. 2. Prasarana Jalan dan Jembatan

A. Kebijakan :

1. Mempertahankan dan menjaga tingkat kemantapan dan pelayanan kondisi permukaan jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan jalan dan jembatan yang sudah menurun kondisi tingkat pelayanannya.
3. Membuka daerah terisolasi dan terbelakang terutama di wilayah pedalaman, terpencil dan tertinggal.
4. Menyusun dan membuat perencanaan yang mantap dan sinergis serta penyuluhan yang komprhensif.

B. Program Strategis :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan negara, propinsi, dan kabupaten.
2. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan.
3. Pembangunan jalan pedesaan.
4. Pembangunan jembatan Muara Ancalong, Muara Wahau.
5. Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.

V. 3. Perhubungan Darat

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat.
2. Mempertahankan dan menjaga kondisi fasilitas sarana dan prasarana perhubungan darat.

B. Program Strategis :

1. Pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan darat.

V. 4. Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan sungai, danau, dan penyeberangan.
2. Mempertahankan dan menjaga kondisi fasilitas sarana dan prasarana perhubungan sungai, danau, dan penyeberangan.

B. Program Strategis :

1. Pembangunan fasilitas perhubungan sungai, danau, dan penyeberangan.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan sungai, danau, dan penyeberangan.

V. 5. Perhubungan Laut

A. Kebijakan:

1. Membangun Sarana dan Prasarana transportasi laut dengan mempertimbangkan karakteristik modal transportasi, pola perwilayahan dan faktor spesifik masing-masing wilayah kecamatan.
2. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi laut yang handal dan berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas keselamatan pelayaran.

B. Program Strategis :

1. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana transportasi laut dan sungai.
2. Peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan transportasi laut dan sungai.
3. Peningkatan dan pengembangan keselamatan pelayaran.

V. 6. Perhubungan Udara

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi udara yang handal dan berkualitas.

2. Mengembangkan angkutan udara dalam rangka membantu mobilitas orang dan barang.
3. Meningkatkan keselamatan penerbangan.

B. Program Strategis :

1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Udara / Bandara Khusus Tanjung Bara dan Bandara Sangkimah untuk melayani kebutuhan angkutan udara bagi penumpang dan barang.
2. Penyediaan dan pengembangan keselamatan penerbangan dengan melengkapi alat komunikasi dan alat navigasi yang handal dan berkemampuan tinggi.

V. 7. Energi dan Ketenagalistrikan

A. Kebijakan :

1. Penyusunan PERDA tentang ketenagalistrikan (pengusahaan, penetapan harga jual listrik, penyusunan tata ruang pengembangan kelistrikan).
2. Mendorong terealisasinya komitmen kerjasama stakeholders dalam penambahan kapasitas pembangkit, jaringan transmisi serta pengadaan bahan baku bahan bakar (solar dan batubara).

B. Program Strategis :

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
2. Pengembangan listrik pedesaan dan daerah-daerah terpencil / tertinggal.
3. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pengoperasian kelistrikan.
4. Pembinaan pelaksanaan dan monitoring Community Development pada usaha kelistrikan.

V. 8. Pos dan Telekomunikasi

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan pos dan telekomunikasi ke seluruh perdesaan.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia serta pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pengembangan dan pembangunan industri pos dan telekomunikasi.

B. Program Strategis :

1. Perluasan dan pengembangan jaringan pos dan giro merata ke seluruh perdesaan.
2. Pengembangan telekomunikasi secara terpadu dengan sektor pembangunan lainnya dan merata ke segenap wilayah.

V. 9. Perumahan dan Permukiman (Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Drainase)

A. Kebijakan :

1. Penyediaan dan peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan fasilitas umum/sosial kawasan perumahan dan lingkungan permukiman.

B. Program Strategis :

1. Peningkatan dan pembangunan perumahan pemukiman.
2. Peningkatan dan pembangunan air bersih di Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan desa-desa.
3. Peningkatan dan pembangunan sistem sanitasi, drainase lingkungan, dan persampahan.
4. Penataan kawasan perumahan pada kawasan kumuh.
5. Pengaturan tata ruang yang teratur dan terkendali khususnya pada wilayah pengembangan baru.

VI. BIDANG PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

VI. 1. Perbaikan Pengelolaan SDA dan Pelestarian LH

A. Kebijakan :

1. Pengelolaan sumberdaya alam dan daya dukungnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk generasi sekarang dan selanjutnya.
2. Pendayagunaan sumberdaya alam mengutamakan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
3. sumberdaya alam yang terbarukan dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa.
4. Sumberdaya alam yang baik tidak terbarukan harus digunakan sehemat mungkin.

B. Program Strategis :

1. Pengelolaan lingkungan alam.
2. Pengelolaan lingkungan buatan.
3. Pengelolaan lingkungan sosial.
4. Pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia.
5. Penataan dan penegakan hukum lingkungan.
6. Standar mutu lingkungan hidup.
7. Pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan.
8. Pengendalian pencemaran lingkungan.
9. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

VI. 2. Pemantapan Pemanfaatan SDA

A. Kebijakan :

1. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

2. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat serta kemampuan sumberdaya manusia.

B. Program Strategis :

1. Peningkatan kapasitas lembaga dan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
2. Pengembangan perangkat pendukung sistem (aturan main dan regulasi) pemanfaatan sumberdaya alam.

VII. BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN

VII. 1. Pembenahan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Daerah

A. Kebijakan :

1. Menyesuaikan kembali produk-produk hukum (peraturan daerah) berdasarkan kondisi, potensi, dan kewenangan daerah serta terhadap peraturan perundangan di atasnya.
2. Mengembangkan Peraturan Daerah tentang penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dan kegiatan investasi.

B. Program Strategis :

1. Penyusunan dan pembaruan produk-produk hukum sesuai, kondisi, potensi, dan kewenangan daerah.
2. Program penyesuaian Kembali Produk Peraturan Daerah yang ada terhadap Peraturan Perundangan di atasnya.
3. Program Pengembangan Peraturan Daerah Tentang Penerimaan Daerah yang Bersumber dari PAD.
4. Program Pengembangan Peraturan Daerah Tentang Kegiatan Investasi.

VII. 2. Penghayatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM

A. Kebijakan :

1. Menciptakan ketertiban umum dan kepastian hukum.
2. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia secara tegas berdasarkan azas keadilan.
3. Mewujudkan ketertiban masyarakat.

B. Program Strategis :

1. Peningkatan supremasi hukum yang berkeadilan.
2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan perangkat umum.
3. Peningkatan sarana dan prasarana perangkat umum.

VII. 3. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa

A. Kebijakan :

1. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan.
2. Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.
3. Peningkatan budaya aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab.
4. Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif.
6. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pemberian pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi.
7. Mengoptimalisasikan pengembangan dan pemanfaatan e-Government dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

B. Program Strategis :

1. Penerapan tata pemerintah yang baik (good governance).
2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.
3. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
4. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan perangkat pengawasan yang handal.

VII. 4. Penguatan Implementasi Otonomi Daerah

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonom daerah.
2. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.

B. Program Strategis :

1. Pembangunan Karakter dan Kapasitas (*Character and Capacity Building*) Pemerintahan Daerah.

2. Peningkatan kegiatan pembangunan yang pelayanannya bersumber dari APBD Provinsi, APBN dan BLN serta investor besar.

VII. 5. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

A. Kebijakan :

1. Membangun kerjasama dengan daerah-daerah lain khususnya daerah *hinterland* Kabupaten Kutai Timur.
2. Membangun sistem jejaring kerja (*network*) dengan daerah lain yang saling menguntungkan, sebagai sarana saling berbagi pengalaman (*sharing of experiences*), saling berbagi manfaat (*sharing of benefits*), maupun saling berbagi dalam memikul tanggungjawab dan pembiayaan pembangunan (*sharing of burdens*), terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi (*scale of economy*) tertentu dalam rangka efisiensi.

B. Program Strategis :

1. Pengembangan kerjasama bidang ekonomi dan sosial.
2. Pengembangan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengembangan kerjasama wilayah perbatasan.

VII. 6. Perwujudan Kehidupan Demokrasi yang Semakin Kokoh

A. Kebijakan :

1. Meningkatkan hubungan eksekutif-legislatif berdasarkan mekanisme *check and balance* dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
2. Memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*) disertai jaminan dalam menggunakan hak-hak/aspirasi politik.
3. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai demokrasi Pancasila dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengembangkan sikap toleran dan arif, serta menunjang tinggi etika demokrasi dan keberagaman aspirasi politik.
5. Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat.

B. Program Strategis :

1. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi untuk mewujudkan fungsi-fungsi dan hubungan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal.
2. Perbaikan proses politik untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemilihan umum dan uji kelayakan publik, serta pelemagaan perumusan kebijakan publik.

3. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, transparan, dan bertanggung jawab, serta dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan.

VII. 7. Perencanaan dan Pengendalian

A. Kebijakan :

1. Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

B. Program Strategis:

1. Penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintahan dan pengawasan.
2. Perencanaan pembangunan yang berkualitas.
3. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

VII. 8. Keuangan Daerah

A. Kebijakan :

Meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

B. Program Strategis:

1. Peningkatan administrasi kas daerah.
2. Penataan administrasi keuangan.
3. Peningkatan penerimaan daerah.

VIII. BIDANG PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN MASYARAKAT

VIII. 1. Peningkatan Perlindungan, Pengamanan dan Ketentraman Masyarakat

A. Kebijakan :

Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan perlengkapan sarana, prasarana, dan fasilitas aparat keamanan TNI/POLRI.

B. Program Strategis :

1. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana aparat keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pembangunan pos-pos keamanan ditempat yang strategis sesuai dengan keperluan aparat keamanan.
3. Penambahan sarana komunikasi untuk mendukung tugas-tugas keamanan TNI/POLRI.

4. Pembangunan fasilitas perkantoran untuk satuan keamanan mengikuti gerak pemekaran wilayah kecamatan.

VIII. 2. Pembinaan Kesatuan Bangsa

A. Kebijakan :

Meningkatkan kualitas integrasi sosial budaya melalui penguatan kelembagaan sosial budaya dan perbaikan perilaku sosial menyimpang.

B. Program Strategis :

1. Pengembangan struktur politik yang demokratis didaerah.
2. Pengembangan budaya politik demokratis.
3. Pemberdayaan kelembagaan sosial dan budaya.
4. Peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa.
5. Peningkatan dan memantapkan wawasan kebangsaan.

IX. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

IX.1. Tata Ruang dan Pertanahan

A. Kebijakan :

1. Mewujudkan penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang efektif dan partisipasi dalam kerangka pemanfaatan sumber daya secara bersama dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah/kawasan dan antar sektor.
2. Mewujudkan tertib penggunaan/penguasaan tanah, tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
3. Pendistribusian lahan pertanian seluas 5 Ha untuk setiap kepala keluarga petani/pekebun/petambak.

B. Program Strategis :

1. Review rencana tata ruang wilayah kabupaten berkaitan dengan penambahan sebelas wilayah kecamatan menjadi delapan belas wilayah kecamatan.
2. Review rencana perwilayahan komoditi yang telah ditetapkan disesuaikan dengan rencana pengembangan kawasan pertumbuhan :
 - a. Kawasan Sangatta, Sangatta Utara, Teluk Pandan, Rantau Pulung dan Bengalon
 - b. Kawasan Sangsaka dan Karang Dalam
 - c. Kawasan Muara Wahau, Kombeng dan Telen.
 - d. Kawasan Muara Ancalong, Busang, Muara Bengkal, Batu Timbau dan Batu Ampar.
3. Konsolidasi pertanahan di seluruh wilayah kabupaten disesuaikan dengan peruntukannya.

4. Pensertifikatan tanah melalui PRODA masing-masing 5 Ha kepada setiap kepala keluarga petani/pekebun/petambak.

IX. 2. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

A. Kebijakan :

1. Mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dan kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah sekitarnya melalui keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber daya yang ada secara mandiri.
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya alam dimiliki.

B. Program Strategis :

1. Pembangunan dan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan, ekonomi dan sosial termasuk *outlet-outlet* pemasaran yang efisien yang menghubungkan dengan pusat perdagangan regional, nasional dan internasional, termasuk menghubungkan dengan wilayah-wilayah belakangnya.
2. Peningkatan insentif dalam investasi melalui pemberian insentif yang kompetitif, antara lain insentif pajak, kemudahan perizinan, dan hak pengelolaan lahan yang kompetitif dibanding daerah-daerah lain.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan komunitas-komunitas dalam rangka mendukung kebijakan program Gerdabangagri.

IX. 3. Pengembangan Wilayah Perbatasan

A. Kebijakan :

Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan orientasi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga, dengan pendekatan pembangunan yang bersifat pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

B. Program Strategis :

Membangun kota satelit pada kawasan-kawasan kecamatan yang berbatasan dengan daerah tetangga.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

